



BUPATI JOMBANG

**PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 50 TAHUN 2009**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2010**

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013 sebagaimana diamanatkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2008 perlu dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang Tahun 2010;
- b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang Tahun 2010 ini disusun sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jombang Tahun 2010;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang Tahun 2010 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor);

18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2010.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah;
2. Bupati adalah Bupati Jombang;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten;
6. RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2010 adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang tahun 2010.

Pasal 2

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Jombang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2010 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan upaya pengembangan, pemeliharaan, dan kesinambungan dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013 yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
- (2) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : EVALUASI HASIL KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
 - BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN
 - BAB IV : SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2010

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI : PENUTUP.

- (3) Uraian secara rinci RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai:

1. Pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2010.
2. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun 2010.

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang menelaah kesesuaian Renja-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 2 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam

Berita Daerah Kabupaten Jombang			
No.	Isi	Paraf	Tanggal
1.			
2.			
3.			
4.	Keputusan Bupati		

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 10 Agustus 2009

BUPATI JOMBANG

SUYANTO

M. MUNIF KUSNAN, SH. MSI.
Pembina Utama Muda
NIP. 19530412 197903 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009 NOMOR 50 /E

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2010**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 mengamanatkan bahwa setiap Daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM Daerah, yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2010 merupakan acuan bagi Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2010. RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2010 juga menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2010.

Berdasarkan RKPD dimaksud, Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyepakati Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2010.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang Tahun 2010 mempunyai maksud:

1. Sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2009;
2. Sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2010;
3. Sebagai acuan bagi seluruh komponen masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Daerah;
4. Sebagai alat bagi seluruh komponen masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Daerah.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang Tahun 2010 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antarwilayah, antarsektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan, serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Sistematika dokumen RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika RKPD

BAB II EVALUASI HASIL KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

- 2.1. Evaluasi Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2008 dan Realisasi RPJMD
- 2.3. Isu Strategis dan Masalah Mendesak

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

- 3.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2008 dan Perkiraan Tahun 2009
- 3.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2010 dan Tahun 2011
- 3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.4. Analisis dan Perkiraan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah
- 3.5. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2010

- 4.1. Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi
- 4.2. Strategi, Arah Kebijakan, dan Prioritas Program Pembangunan Daerah

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI PENUTUP

BAB II EVALUASI HASIL KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

2.1. EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN DAERAH

Evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah tahun 2008 difokuskan pada pencapaian kinerja makro yang meliputi indikator ekonomi dan sosial.

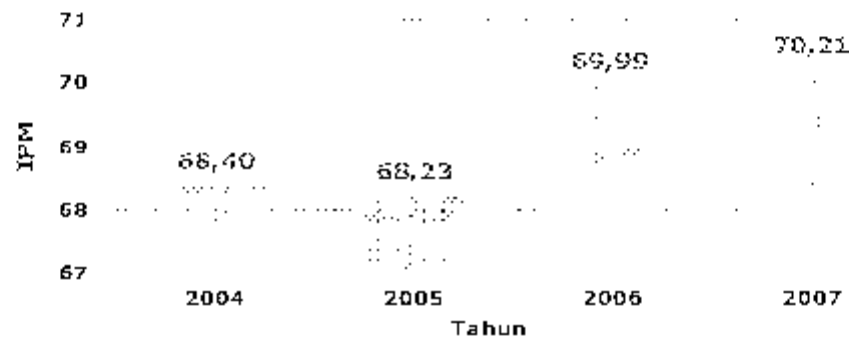
2.1.1. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan kesejahteraan penduduknya. IPM ini merupakan indeks komposit dari 3 (tiga) jenis indeks yang mengukur tingkat kesehatan, pendidikan dan pendapatan masyarakat yang diukur melalui tingkat daya beli masyarakat.

IPM Kabupaten Jombang tahun 2008 mencapai 71,28; yang terbentuk dari indeks harapan hidup sebesar 72,39; indeks pendidikan sebesar 79,73; dan indeks daya beli sebesar 61,73.

Gambar 2.1.

Perkembangan IPM Kabupaten Jombang Tahun 2004-2008



Sumber data: Bappeda Kabupaten Jombang, tahun 2008

Nilai IPM Kabupaten Jombang tahun 2008 meningkat sebesar 1,07 dari tahun 2007; yaitu dari sebesar 70,21 menjadi sebesar 71,32. Peningkatan IPM ini disumbangkan oleh peningkatan indeks pendidikan sebesar 2,38; yaitu dari sebesar 77,33 pada tahun 2007 menjadi 79,71 pada 2008; kemudian peningkatan indeks harapan hidup sebesar 1,60; dari sebesar 70,81 pada 2007 menjadi 72,41 pada tahun 2008; dan penurunan indeks daya beli sebesar 0,74; yaitu dari sebesar 62,47 pada 2007 menjadi 61,73 pada 2008. Penurunan indeks daya beli ini dapat dijelaskan sebagai dampak negatif dari kenaikan harga BBM yang diikuti oleh kenaikan harga barang-barang yang lain.

Tabel 2.1.

Perkembangan IPM Kabupaten Jombang Tahun 2007-2008

No	Indeks	2007	2008	Selisih
1.	Indeks Harapan Hidup	70,21	71,28	1,07
2.	Indeks Pendidikan	70,81	72,41	1,60
3.	Indeks Daya Beli	77,33	79,71	2,38
	IPM	62,47	61,73	(0,74)

Sumber: Data: Bappeda Kabupaten Jombang

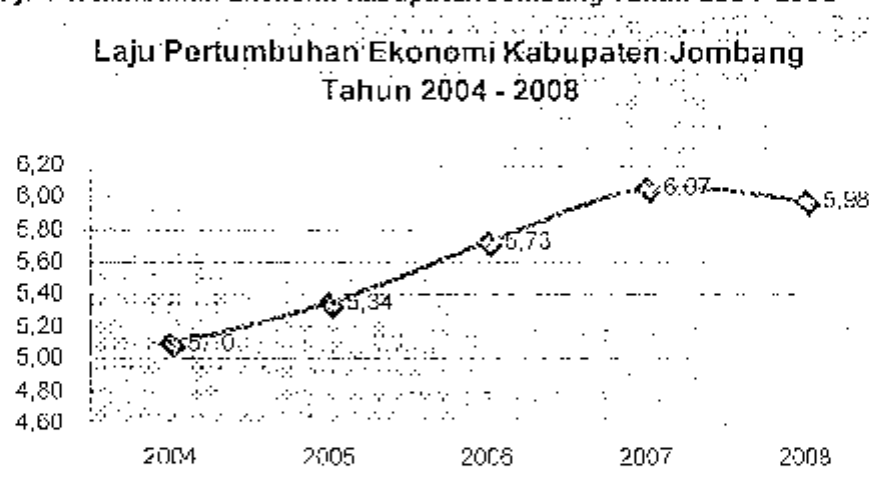
Berdasarkan capaian tersebut Kabupaten Jombang status pembangunan manusianya termasuk dalam kategori menengah atas. Secara umum IPM tahun 2008 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2007, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah Kabupaten dibidang kesejahteraan masyarakat telah berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan pemerintah kabupaten, walaupun secara jujur masih banyak yang harus ditingkatkan lebih baik lagi agar kesejahteraan masyarakat dapat segera diwujudkan.

2.1.2. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Laju pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2008 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami sedikit penurunan, yaitu dari sebesar 6,07% pada tahun 2007 menjadi sebesar 5,98% pada tahun 2008. Hal ini merupakan dampak dari kenaikan BBM yang diikuti oleh kenaikan harga barang-barang yang lain sehingga meningkatkan laju inflasi dari sebesar 7,17% pada tahun 2007 menjadi sebesar 8,34% pada tahun 2008. Apabila dilihat dari PDRB Atas Dasar Konstan, dalam kurun waktu 5 tahun, perekonomian Kabupaten Jombang telah tumbuh dari 5,10 % pada tahun 2004 menjadi 5,98 % pada tahun 2008; pertumbuhan ini terjadi pada semua sektor ekonomi.

Gambar 2.2.

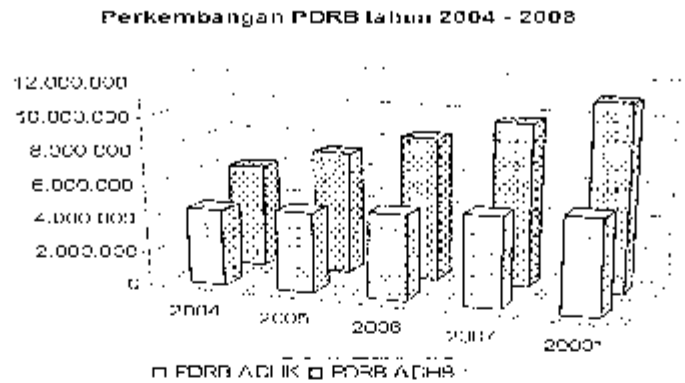
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jombang Tahun 2004-2008



Sumber Data: Perhitungan PDRB Kab. Jombang Tahun 2007 – BPS Kab. Jombang, Angka perhitungan tahun 2008 merupakan angka sementara.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Jombang mengalami peningkatan dari Rp. 9,736 triliun pada tahun 2007 menjadi Rp. 11,179 triliun pada tahun 2008; sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Jombang mengalami peningkatan dari sebesar Rp. 5,353 triliun pada tahun 2007 menjadi sebesar Rp. 5,573 triliun pada tahun 2008.

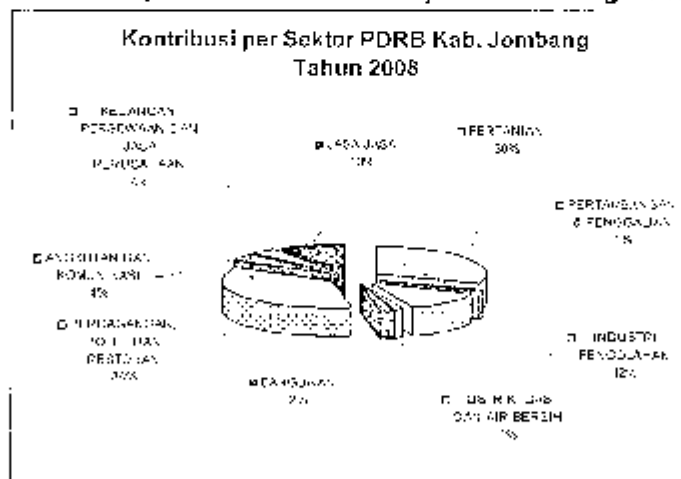
Gambar 2.3.
Perkembangan PDRB Kabupaten Jombang Tahun 2004-2008



Sumber Data: Perhitungan PDRB Kab. Jombang Tahun 2007 – BPS Kab. Jombang, Angka perhitungan tahun 2008 merupakan angka sementara.

Kontribusi sektor tertinggi PDRB Kabupaten Jombang tahun 2008 adalah dari sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 35,42%; disusul kemudian sektor pertanian sebesar 30,42%, sektor industri pengolahan sebesar 12,19%, sektor jasa-jasa sebesar 9,65%, sektor keuangan, perbankan dan jasa perusahaan sebesar 3,79%, sektor angkutan dan komunikasi sebesar 3,78%, sektor bangunan sebesar 2,25%, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 1,40%, sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 1,09%.

Gambar 2.4.
Kontribusi per Sektor PDRB Kabupaten Jombang Sektoral Tahun 2008



Sumber Data : Perhitungan PDRB Kab. Jombang Tahun 2007 – BPS Kab. Jombang, Angka perhitungan tahun 2008 merupakan angka sementara.

Apabila dilihat dari kontribusi per sektor menunjukkan telah terjadi sedikit pergeseran ekonomi, dari dominasi sektor pertanian bergeser sedikit pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Namun demikian kontribusi sektor pertanian masih cukup besar, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Jombang masih berorientasi agraris.

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2008 DAN REALISASI RPJMD

Evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah tahun 2008 difokuskan pada pencapaian kinerja makro yang meliputi indikator ekonomi dan sosial.

Pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2008 merupakan tahapan terakhir pelaksanaan Rencana Strategis Daerah Kabupaten Jombang tahun 2003–2008, dengan visi: **Menuju Jombang Yang Agamis Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera, Tahun 2008.**

Visi ini dijabarkan ke dalam misi Kabupaten Jombang yaitu memberdayakan potensi daerah yang berbasis sumberdaya lokal melalui penyediaan sarana dan prasarana wilayah dan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan serta ditunjang dengan profesionalisme aparatur pemerintah dan mobilisasi sumber keuangan daerah yang efektif dan efisien.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut ditetapkan, pada Tahun 2008 ditetapkan 7 (tujuh) prioritas pembangunan, yaitu:

1. Peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan;
2. Revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan;
3. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan;
4. Peningkatan kesempatan kerja, investasi dan kewirausahaan;
5. Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur;
6. Pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
7. Peningkatan pemerintahan yang baik.

Pemerintah Kabupaten Jombang pada tahun 2008 menyelenggarakan 31 urusan pemerintahan yang terdiri dari 24 urusan wajib dan 7 urusan pilihan, dengan pencapaian kinerja sebagaimana berikut:

1. URUSAN PENDIDIKAN

Pelaksanaan pelayanan pendidikan di Kabupaten Jombang tahun 2008 diarahkan pada meningkatkan derajat pendidikan masyarakat. Pelayanan tersebut telah terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut:

- a. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI meningkat sebesar 2,37% dari APM tahun 2007 sebesar 89,87% menjadi sebesar 92,00% di tahun 2008, APM untuk SMP/MTs meningkat sebesar 5,45% yaitu dari APM tahun 2007 sebesar 79,63% menjadi sebesar 83,97% di tahun 2008 sedangkan APM untuk SMA/MA/SMK meningkat sebesar 1,63% yaitu dari APM tahun 2007 sebesar 62,66% menjadi sebesar 63,68% di tahun 2008;
- b. Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk SD/MI meningkat sebesar 1,22% dari APK tahun 2007 sebesar 102,95% menjadi sebesar 104,21% di tahun 2008, APK untuk SMP/MTs meningkat sebesar 2,50% dari APK tahun 2007 sebesar 99,10% menjadi sebesar 101,58% di tahun 2008, serta APK untuk SMA/SMK/MA meningkat sebesar 0,30% dari APK tahun 2007 sebesar 86,33% menjadi sebesar 86,59% di tahun 2008;
- c. Angka putus sekolah untuk SD/MI meningkat dari tahun 2007 sebesar 0,04% menjadi sebesar 0,05% di tahun 2008, untuk jenjang SMP/MTs meningkat dari tahun 2007 sebesar 0,14% menjadi 0,40% di tahun 2008 sedangkan untuk SMA/MA/SMK menurun dari tahun 2007 sebesar 0,69% menjadi sebesar 0,62% di tahun 2008;

- d. Nilai rata-rata UAS/UAN pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs maupun SMA/MA/SMK mengalami peningkatan. Nilai rata-rata UAS/UAN untuk jenjang pendidikan SD/MI meningkat sebesar 0,65%, SMP/MTs meningkat sebesar 1,05% dan SMA/MA/SMK meningkat sebesar 3,75%;
- e. Angka kelulusan sekolah pada tahun 2008 untuk SD/MI sebesar 99,97%, SMP/MTs sebesar 93,86%, sedangkan SMA/MA/SMK sebesar 95,84%;
- f. Rasio jumlah guru terhadap jumlah murid yang dicapai pada tahun 2008 untuk SD/MI sebesar 1:14, SMP/MTs sebesar 1.11, dan SMA/MA/SMK sebesar 1:10;
- g. Rasio jumlah bangku terhadap jumlah murid yang dicapai pada tahun 2008 untuk SD/MI dan SMP/MTs sebesar 1:2 sedangkan SMA/MA/SMK sebesar 1:1;
- h. Rasio jumlah kelas terhadap jumlah murid yang dicapai pada tahun 2008 untuk SD/MI sebesar 1:22, SMP/MTs sebesar 1:35, dan SMA/MA/SMK sebesar 1 : 39.

2. URUSAN KESEHATAN

Pelayanan kesehatan selama 2008 diarahkan kepada Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat serta meluasnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat. Seluruh pelayanan tersebut telah terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari seluruh indikator sebagai berikut :

- a. Angka kematian bayi tahun 2008 sebesar 10,88 per 1000 kelahiran hidup, capaian ini lebih rendah dari capaian tahun 2007 yang sebesar 12,87 per 1000 kelahiran atau capaian kinerjanya sebesar 125,50%. Sedangkan untuk realisasi angka kematian balita sebesar 1 per 1000 kelahiran hidup sama seperti capaian pada tahun 2007;
- b. Angka kematian ibu melahirkan pada tahun 2008 sebesar 80,72 per 100.000 kelahiran hidup. Realisasi ini lebih baik apabila dibandingkan dengan angka kematian ibu melahirkan tahun 2007 yang mencapai 94,5 per 100.000 kelahiran hidup, namun demikian pencapaian ini masih jauh dari target yang ditetapkan dalam indikator Indonesia Sehat 2010;
- c. Realisasi angka kesembuhan penyakit TB Paru sebanyak 554 orang dari pasien yang berobat sebanyak 671 pasien atau sebesar 82,56%, dengan demikian capaian kinerjanya sebesar 107,55%. angka kesakitan DBD sebesar 57,13 per 100.000 penduduk atau kinerjanya tercapai 104,22% dan angka kesakitan AFP sebesar 2.46 per 100.000 penduduk atau tercapai 100%;
- d. Balita dengan gizi buruk di tahun 2008 dari jumlah 33.034 balita yang ditimbang terdapat 59 balita dengan gizi buruk atau dapat dikatakan 0,18% balita yang ditimbang mengalami gizi buruk, capaian ini jauh dibawah target yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan pelayanan terhadap gizi balita telah berjalan dengan baik;
- e. Kecamatan bebas rawan gizi di tahun 2008 sebanyak 12 kecamatan atau tingkat capaian kinerjanya sebesar 75%. Capaian ini menurun dibandingkan hasil tahun 2007 yang tercapai sebanyak 14 kecamatan
- f. Masyarakat yang memanfaatkan puskesmas tahun 2008 sebanyak 559.993 penduduk atau sebesar 48,04% dari jumlah penduduk Kabupaten Jombang;

- g. Penduduk yang memanfaatkan RSUD berdasarkan Kunjungan pasien pada tahun 2008 tercapai sebesar 13,75% dari jumlah penduduk atau dapat dikatakan target tercapai sebesar 103,62%;
- h. *Bed Occupational Rate* (BOR) tahun 2008 adalah 81,16% dengan jumlah tempat tidur 322, bila dibandingkan 2007 BOR Rawat Inap adalah 87,23% dengan jumlah tempat tidur 314 buah maka ada penurunan yang cukup signifikan;
- i. *Lenght of Stay* (LOS) / rata-rata lama tinggal pasien di RS tahun 2008 mengalami peningkatan dari sebesar 4,5 hari pada tahun 2007 menjadi 5,7 hari pada tahun 2008;
- j. *Turn Over Interval* (TOI) / lama waktu jeda pemakaian tempat tidur antara pasien satu dengan yang berikutnya selama tahun 2008 mengalami peningkatan yaitu dari sebesar 0,5 hari pada tahun 2007 menjadi 0,9 hari pada tahun 2008.

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM

Urusan pekerjaan umum selama tahun 2008 diarahkan pada upaya meningkatnya sarana infrastruktur daerah. Capaian kinerja selama tahun 2008 adalah:

- a. Jalan

Pada tahun 2008 terdapat peningkatan panjang jalan aspal sepanjang 59,10 Km. Sedangkan untuk jalan cengan permukaan makadam dan tanah, pada tahun 2008 panjang jalan makadam mengalami penurunan sepanjang 25 km. Penurunan ini disebabkan adanya peningkatan jalan dari jalan makadam menjadi jalan aspal. Program peningkatan jalan kabupaten juga diselenggarakan melalui sinergisitas antara Pemerintah Daerah, Perum Perhutani dan masyarakat desa sekitar hutan. Realisasi pelaksanaan program tersebut pada tahun 2008 dilakukan melalui pembangunan jalan jurusan Tanjungwadung - Marmoyo - Jipurapah sepanjang 8,6 Km
- b. Jembatan

Pada tahun 2008, jumlah jembatan yang kondisinya baik sebanyak 62 buah atau sebesar 19,6% dari keseluruhan jembatan yang ada di Kabupaten Jombang, sedangkan jumlah jembatan yang kondisinya sedang sebanyak 244 buah dari total 316 buah jembatan di Kabupaten Jombang atau sebesar 77,22%, dan jembatan yang kondisinya rusak/rusak berat sebanyak 10 buah atau sebesar 3,2% dari total 316 buah.
- c. Peningkatan jumlah desa terpencil yang terbuka

Pada tahun 2008 sebanyak 15 desa terpencil telah terbuka, meningkat bila dibandingkan tahun 2007 sebanyak 7 desa.
- d. Luasan jalan lingkungan yang dibangun

Luasan jalan lingkungan yang dicapai pada tahun 2008 seluas 120.838,5 m². Apabila dibandingkan dengan total luasan jalan lingkungan yang dibangun tahun 2007 yang seluas 91.687 m², maka terjadi peningkatan seluas 29.151,5 m² atau 31,79%.
- e. Luas daerah bebas genangan banjir

Luas daerah bebas genangan banjir yang dicapai pada tahun 2008 seluas 50 Ha atau tercapai 100%. Sehingga pada akhir tahun 2008 daerah genangan banjir di wilayah Kabupaten Jombang tinggal 416 Ha. Belum bebasnya daerah genangan banjir disebabkan terjadi curah hujan yang sangat tinggi di akhir tahun 2008 sehingga merusak

infrastruktur pengendali banjir yang ada dan menyebabkan genangan bertambah walaupun hanya genangan sesaat.

- f. Daerah rawan kurang air yang tersisa adalah seluas 599 Ha sampai dengan akhir 2007. Namun pada tahun 2008 luas daerah rawan kurang air berkurang seluas 25 Ha sehingga daerah rawan kurang air tinggal 574 Ha.
- g. Penurunan luasan areal irigasi teknis pada tahun 2008 seluas 1.331 Ha dari 44.923 Ha pada tahun 2007 disebabkan karena adanya perubahan fungsi lahan sawah teknis menjadi peruntukan lain, seperti perumahan/permukiman, perdagangan atau perindustrian.

4. URUSAN PERUMAHAN

Penyelenggaraan urusan ini diarahkan pada meningkatkan prasarana dasar permukiman.

Peningkatan jumlah rumah tidak layak huni yang direhab melalui program Gertak dan PKP yang dicapai pada tahun 2008 sebanyak 2.076 unit atau terdapat penambahan sebanyak 513 unit dari 1.563 unit pada tahun 2007. Pada tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial juga melakukan pemugaran rumah tidak layak huni sebanyak 1.063 unit dalam rangka Pilot Proyek Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP). Dalam tahun 2008 Program P2SPP dilanjutkan lagi dengan melakukan pemugaran rumah sebanyak 1.174 unit rumah yang merata di 21 kecamatan.

5. URUSAN PENATAAN RUANG

Urusan penataan ruang diarahkan untuk meningkatkan penataan ruang daerah yang mempertimbangkan keseimbangan lingkungan. Berkaitan dengan hal tersebut serta dalam rangka menindaklanjuti perubahan RTRW Provinsi dalam Perda Nomor 2 Tahun 2006 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur yang memasukkan Kabupaten Jombang ke dalam pengembangan Gerbangkertosusila Plus, pada tahun 2008 telah dilaksanakan evaluasi dan revisi rencana tata ruang wilayah Kabupaten Jombang. Selain itu revisi dan evaluasi tata ruang juga dilaksanakan pada Ibukota Kecamatan Tembelang dan Bandar Kedungmulyo berkaitan dengan rencana pembangunan jalan tol Mojokerto – Bandar Kedungmulyo.

6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Penyelenggaraan urusan ini diarahkan pada terwujudnya proses perencanaan pembangunan yang aspiratif, partisipatif dan akuntabel. Hal ini dilaksanakan dengan:

- a. Pelembagaan sistem perencanaan partisipatif dengan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dari tingkat desa sampai dengan kabupaten dengan melibatkan masyarakat, LSM, dan legislatif.
- b. Penyusunan dokumen-dokumen perencanaan yang meliputi RKPD tahun 2009, KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2009, KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2008, rancangan akhir RPJPD Kabupaten Jombang tahun 2005-2025 dan Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2008 tentang RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2009-2013.
- c. Penelitian yang dilaksanakan di tahun 2008 sebanyak 10 kegiatan dan seluruh dokumen tersebut telah dimanfaatkan oleh instansi terkait sehingga tingkat capaian kerjanya 100%;

7. URUSAN PERHUBUNGAN

Urusan perhubungan dilaksanakan untuk meningkatnya pelayanan transportasi daerah yang aman, lancar, dan terjangkau. Pelaksanaan urusan ini secara umum telah terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari indikator yang dicapai pada tahun 2008 sebagai berikut :

- a. Jumlah penumpang yang diangkut oleh transportasi umum selama tahun 2008 sebanyak 572.662 orang.
- b. Jumlah sarana dan prasarana transportasi sebagai berikut, terminal sebanyak 5 buah, halte dalam kota sebanyak 6 buah, traffic light sebanyak 18 buah, rambu sebanyak 702 buah dan shelter sebanyak 41 buah. Dengan adanya sarana perhubungan ini diharapkan tingkat kenyamanan dan keamanan pengguna jalan dapat ditingkatkan.

8. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Urusan ini diarahkan pada upaya untuk meningkatnya kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup. Capaian kinerja selama tahun 2008 adalah :

- a. Pemenuhan baku mutu air, secara umum wilayah Jombang masih di bawah ambang batas standar baku mutu yang ditetapkan kecuali untuk limbah rumah sakit yang sebagian besar diatas ambang batas yang ditetapkan.
- b. Pemenuhan baku mutu udara, walaupun di beberapa lokasi di Kabupaten Jombang terdapat beberapa pabrik tetapi secara umum mutu udara di wilayah Jombang masih di bawah batas minimal yang ditetapkan.
- c. Jumlah sampah yang terangkut ke TPA sebanyak 33.736,23 ton atau 88,30% dari sampah yang dihasilkan masyarakat.

Atas pelaksanaan urusan ini, selama tahun 2008 Pemerintah Kabupaten memperoleh penghargaan Kota Adipura ke 3 (tiga) kali Tingkat Nasional dalam Bidang Pengelolaan Lingkungan Perkotaan untuk Kategori Kota Sedang Tahun 2008.

9. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Urusan kependudukan dilaksanakan untuk meningkatnya pelayanan admin strasi kependudukan. Kinerja yang berhasil dicapai pada tahun 2008 adalah:

- a. Pelayanan KTP sebanyak 108.709 lembar KTP dan KK sebanyak 63.512 lembar KK. Dengan meningkatnya pelayanan KTP ini diharapkan seluruh penduduk di Kabupaten Jombang akan capat terdata dengan baik seluruhnya.
- b. Pelayanan akte kependudukan sebanyak 27.853 akte, terutama dari pelayanan akte kelahiran yang terealisasi sebanyak 21.977 akte, selebihnya akte kependudukan lainnya.

10. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Urusan ini terlaksana dengan difokuskan pada upaya untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Secara umum perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam tahun 2008 telah terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari 69 kasus kekerasan yang ditemui, seluruhnya telah ditangani oleh instansi yang terkait. Penanganan tersebut dalam bentuk advokasi dan pendampingan untuk memulihkan trauma psikologis.

Sedangkan jumlah organisasi wanita yang ada di Kabupaten Jombang sampai dengan tahun 2008 sebanyak 38 organisasi. Organisasi tersebut seluruhnya dalam pembinaan Pemerintah Kabupaten Jombang.

11. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Urusan ini dilaksanakan untuk meningkatnya pelayanan keluarga berencana. Indikator yang digunakan untuk menilai urusan ini adalah Rasio peserta KB dengan Pasangan Usia Subur (PUS) tercapai sebesar 79,45% yaitu dihitung dari jumlah peserta KB aktif sebesar 179.008 pasangan dibandingkan prevalensi PUS sebesar 242.252 pasangan.

12. URUSAN SOSIAL

Urusan sosial dilaksanakan untuk meningkatkan bantuan kepada organisasi sosial dan kemasyarakatan. Hal ini terlihat dari jumlah organisasi sosial dan kemasyarakatan yang dibantu selama tahun 2008 sebanyak 2.022 penerima yang terdiri dari 98 tempat ibadah, 633 organisasi sosial dan keagamaan serta 1.291 lembaga pendidikan. Dari seluruh penerima bantuan tersebut tersalur dana bantuan selama tahun 2008 sebesar Rp. 3.724.300.000,-. Meningkatnya bantuan ini merupakan wujud kepedulian Pemerintah Kabupaten terhadap permasalahan sosial yang ada di masyarakat.

Sedangkan untuk jumlah KK Miskin di Kabupaten Jombang sampai dengan tahun 2008 sebanyak 78.044 Kepala Keluarga. Atas jumlah KK miskin yang ada telah dilakukan upaya untuk pengentasan kemiskinan secara terpadu dengan melaksanakan 9 program baik berasal dari anggaran APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.

13. URUSAN KETENAGAKERJAAN

Urusan ini difokuskan pada meningkatnya daya serap tenaga kerja daerah. Usaha ini secara umum telah berhasil dilaksanakan dengan baik. Indikator keberhasilan tersebut adalah :

- a. Angka pengangguran terbuka tahun 2007 sebesar 6,97% atau sebanyak 45.288 orang.
- b. Penempatan tenaga kerja ke luar negeri selama pada tahun 2008 sebanyak 413 orang dibanding tahun 2007 meningkat sebanyak 169,93%.

14. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Urusan ini dilaksanakan dengan fokus untuk meningkatnya Kualitas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Indikator yang berhasil dicapai dalam mewujudkan fokus kerja tersebut adalah :

- a. Koperasi yang terbentuk pada tahun 2008 sebanyak 444 lembaga meningkat sebanyak 27 lembaga dari tahun 2007, sedangkan UKM adalah sebanyak 23.950 UKM atau meningkat sebanyak 775 UKM dari tahun 2007;
- b. Volume usaha yang berhasil dicapai pada tahun 2008 sebesar Rp. 895.390.526.400,- Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2007 sebesar Rp. 877.968.210.000,- maka volume usaha tahun 2008 meningkat sebesar Rp. 17.422.316.400,- atau sebesar 1,94% yang disebabkan adanya peningkatan jumlah volume usaha koperasi.

15. URUSAN PENANAMAN MODAL

Urusan penanaman modal diarahkan pada meningkatkan investasi di daerah. Penanaman modal di Kabupaten Jombang tahun 2008 tercapai sebesar Rp. 275.050.499.000,- atau tercapai sebesar 156,28%. Realisasi investasi ini hanya berdasarkan perhitungan terhadap industri formal yang terdaftar pada Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur. Realisasi ini meningkat apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2007 yang tercapai sebesar Rp. 267.430.106.398,-

16. URUSAN KEBUDAYAAN

Urusan ini dilaksanakan untuk meningkatkan pelestarian seni dan budaya. Indikator yang dapat diukur untuk menilai keberhasilan upaya ini adalah:

- a. Prestasi yang berhasil dicapai pada tahun 2008 sebanyak 8 (delapan). Tujuh prestasi tingkat Jawa Timur dan satu prestasi tingkat internasional bidang penata terbaik pasamuhan budaya panji.
- b. Jumlah kelompok seni yang ada pada tahun 2008 sebanyak 500 kelompok. Melalui pembinaan yang terus menerus diharapkan kelompok seni inilah yang akan menjadi pelestari budaya di daerah.

17. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Kebijakan umum urusan ini selama tahun 2008 diarahkan kepada mewujudkan generasi muda yang berprestasi dan meningkatkan prestasi olah raga. Indikator kinerja yang berhasil dicapai untuk kepemudaan adalah jumlah pemuda berprestasi pada tingkat nasional dan regional sebanyak 25 orang. Prestasi tersebut diantaranya adalah wasit nasional paskiara Jawa Timur, serta atlet olah raga Jawa Timur maupun tingkat nasional yaitu karate, atletik, sepakbola dan tenis meja.

Sedangkan untuk olah raga, jumlah cabang olah raga yang berprestasi sebanyak 4 cabang serta jumlah atlet yang berprestasi sebanyak 25 orang.

18. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Urusan ini difokuskan kepada upaya meningkatkan ketentraman dan ketertiban (tramtib) masyarakat. Indikator yang digunakan untuk mengukur usaha ini adalah:

- a. Penyelesaian permasalahan tramtib di masyarakat terlaksana dengan baik. Pada tahun 2008 ditemukan sebanyak 1.147 kejadian, dapat diselesaikan 952 kejadian. Hal ini disebabkan terbatasnya jumlah personil yang bertugas.
- b. Pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang ditemukan pada tahun 2008 sebanyak 121 pelanggaran. Atas pelanggaran tersebut seluruhnya telah diberikan tindakan sesuai dengan tingkat kesalahannya.

19. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Penyelenggaraan Urusan ini dilaksanakan berdasarkan azas-azas good governance untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik dari pelaksanaan pelayanan pemerintahan. Urusan ini secara umum telah terlaksana sesuai dengan harapan. Beberapa indikator yang dapat diukur untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan urusan ini adalah :

- a. Jumlah desa dengan Pendapatan Asli Desa diatas 40% belanja desa tercapai sebanyak 45 desa. Jumlah ini tidak bertambah selama tiga tahun terakhir. Dengan digulirkannya ADD, diharapkan pemerintah desa

dapat menggali pendapatan asli desanya sehingga mampu membangun kemandiriannya.

- b. Jumlah peraturan hukum daerah yang diterbitkan selama tahun 2008 sebanyak 226 peraturan. Peraturan tersebut dalam bentuk Perda, Peraturan Bupati dan SK Bupati.
- c. Penataan kelembagaan selama tahun 2008 telah terlaksana berupa penyempurnaan kelembagaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007. Penyempurnaan ini didukung dengan diterbitkannya 10 Perda tentang kelembagaan.
- d. Tiga satuan kerja telah menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- e. Dalam bidang pengawasan, pengawasan dilakukan oleh Bagian Pembangunan, Bawasda maupun Badan Pemeriksa Keuangan. Bagian Pembangunan melakukan pengawasan secara preventif. Setiap tahunnya Bagian Pembangunan melakukan pengawasan terhadap 50% dari seluruh kegiatan pembangunan. Belum terawasinya secara keseluruhan kegiatan ini karena terbatasnya jumlah pengawas. Oleh karena itu dalam perjalanan kegiatan masih mungkin terjadi beberapa penyimpangan terhadap pelaksanaan kegiatan terutama terhadap mutu/kualitas sebagian proyek yang tidak sesuai dengan ketentuan. Sedangkan untuk pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas dan BPK telah seluruhnya dilakukan.
- f. Perkembangan BUMD. Dari empat buah BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten sebanyak 2 BUMD telah mampu menghasilkan laba yaitu PD Apotik Seger dan PD BPR Bank Pasar. Sedangkan 2 BUMD lagi masih mengalami kerugian yaitu PD Panglungan dan PDAM Kabupaten Jombang. Dua BUMD yang telah memperoleh keuntungan tersebut, telah mampu memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah.
- g. Dari dua BUMD yang merugi tersebut, PD Panglungan merugi karena efisiennya pengelolaan Perusahaan Perkebunan. Sedangkan PDAM merugi karena masih menanggung hutang sebesar 13 milyar kepada Pemerintah Pusat sehingga setiap tahunnya harus menanggung bunga dan denda pembayaran.
- h. Penatausahaan keuangan dan asset daerah telah dilaksanakan secara komputerisasi. Hal ini semakin mendukung komitmen daerah untuk menerbitkan laporan keuangan tepat waktu.
- i. Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2008 meningkat sebesar 21,33%.
- j. Dalam bidang pemerintahan, Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dapat dilaksanakan dalam situasi yang kondusif, aman dan terkendali.

20. URUSAN KEPEGAWAIAN

Urusan ini diarahkan pada meningkatnya pengelolaan aparatur yang profesional. Urusan ini secara umum telah terlaksana dengan baik. Beberapa indikator yang dapat diukur untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan urusan ini adalah :

- a. Diklat kepemimpinan tingkat IV yang dilaksanakan sebanyak 40 orang atau sebesar 100%, sedangkan Diklat kepemimpinan tingkat II sebanyak 2 orang atau sebesar 50%. Tidak tercapainya realisasi 100% Diklat kepemimpinan tingkat II ini dikarenakan pelaksanaan Diklat kepemimpinan tingkat II tahap ke II waktu pelaksanaannya pada akhir tahun anggaran 2008, sehingga sebanyak 2 orang tidak bisa dikirim.

- b. Pegawai yang mengikuti pelatihan fungsional pegawai pada tahun 2008 sebanyak 362 pegawai. Diklat yang dilaksanakan antara lain diklat peningkatan kompetensi guru melalui *continuous improvement learning*, diklat pemegang kas daerah, diklat operasional pengairan, diklat pengadaan barang dan jasa pemerintah dan sertifikasi.
- c. Pelanggaran disiplin pegawai yang terjadi di tahun 2008 sebanyak 28 kasus. Pelanggaran disiplin berat tahun 2008 terjadi sebanyak 4 kasus. Untuk pelanggaran disiplin sedang tidak terjadi kasus. Sedangkan pelanggaran disiplin ringan terjadi sebanyak 20 kasus dan pelanggaran lainnya sebanyak 2 kasus.

21. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Urusan pemberdayaan masyarakat diarahkan pada meningkatnya mobilisasi dana masyarakat dalam pembangunan. Jumlah dana swadaya masyarakat yang terkumpul untuk pembangunan tahun 2008 sebanyak Rp. 35.878.937.000.

Tingginya animo masyarakat dalam partisipasi swadaya pembangunan ini adalah fenomena yang menggembirakan bagi Pemerintah Kabupaten mengingat sumber pendanaan pemerintah yang terbatas jumlahnya, selain meringankan bagi pemerintah juga merupakan bentuk kesadaran masyarakat tentang tanggungjawabnya dalam pembangunan.

22. URUSAN STATISTIK

Urusan ini dilaksanakan dengan mewujudkan dokumen statistik daerah yang valid dan akurat. Dokumen yang telah dihasilkan diantaranya adalah buku Kabupaten Jombang Dalam Angka, Perhitungan PDRB dan Pengukuran IPM. Dokumen tersebut setiap tahun telah mampu disusun secara tepat waktu.

23. URUSAN KEARSIPAN

Urusan ini dilaksanakan dengan fokus pada menyelenggarakan sistem kearsipan dan PDE yang memadai. Jumlah satuan kerja yang sistem kearsipannya baik dan tertib sebanyak 63 SKPD atau 100% dari SKPD yang ada. Tercapainya kondisi ini akibat adanya bimbingan dan pelatihan kepada satuan kerja secara terus menerus kepada beberapa satuan kerja yang dianggap masih kurang baik sistem kearsipannya.

24. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Urusan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatnya informasi dan komunikasi pemerintah kepada masyarakat. Komunikasi ini yang terjadi selama ini telah berjalan dengan baik terutama melalui media cetak dan elektronik khususnya radio. Komunikasi tersebut dilaksanakan dalam bentuk berupa dialog Warung Pojok Kebonrojo sebanyak 48 kali, tilik desa 4 kali dan sarasehan bupati dengan tokoh agama dan masyarakat sebanyak 4 kali.

25. URUSAN PERTANIAN

Urusan pertanian dilaksanakan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura. beberapa indikator untuk pencapaian kinerja urusan ini adalah :

- a. Terwujudnya 11 lokasi perwilayahan komoditas. Komoditas andalan yang dikembangkan di Kabupaten Jombang adalah durian bido, jambu.

gondang manis, salak doyong, mangga podang, jeruk nipis, semangka dan cabe kecil.

- b. Tahun 2008 terdapat 523 industri di Kabupaten Jombang. Dari jumlah tersebut sebanyak 23 unit industri merupakan industri hulu dan selebihnya sebanyak 500 unit industri merupakan industri hilir.
- c. Peningkatan produksi tanaman pangan pada komoditas kedelai, padi dan jagung. Sedangkan peningkatan produksi hortikultura pada produksi salak dan mangga.
- d. Secara umum produktivitas tanaman pangan dan hortikultura mengalami peningkatan. Peningkatan ini dikarenakan adanya penyuluhan yang dilakukan secara terus menerus oleh petugas lapangan serta adanya pemakaian bibit unggul pada setiap tanaman komoditas.
- e. Populasi hewan ternak dan unggas sebanyak 7.970.882 ekor;
- f. Produksi daging dan telur sebesar 10.650,74 ton daging dan telur sedangkan produksi susu sebesar 4.014,10 liter;
- g. Produksi perkebunan sebesar 1.137.175,51 ton yang didominasi oleh produksi unggulan Kabupaten Jombang berupa tebu. Trend hasil produksi komoditas kopi, kakao dan cengkeh mengalami kenaikan sedangkan untuk kelapa, kapuk, randu, jambu mete, tembakau dan tebu mengalami penurunan;
- h. Peningkatan infra struktur pertanian berupa penambahan empat unit sumur pantek, satu unit embung baru, rehabilitasi jitu dan jides.
- i. Stok pangan tahun 2008 sebesar 207.620 ton. Jumlah ini diatas kebutuhan masyarakat kabupaten jombang sebesar 111.412 ton. Kelebihan stok pangan sebagai cerminan Kabupaten Jombang termasuk daerah lumbung pangan di Jawa Timur.

26. URUSAN KEHUTANAN

Urusan kehutanan difokuskan pada upaya meningkatkan produksi hasil hutan dengan mempertimbangkan konservasi alam. Produksi kayu hutan rakyat yang diperoleh selama tahun 2008 sebanyak 3.239 meter kubik. Produksi ini merupakan hasil olahan hutan oleh masyarakat sekitar tepi hutan tidak termasuk hasil dari perhutani.

Selain produksi kayu, pemerintah juga melakukan penanaman hutan. Jumlah tanaman yang ditanam selama tahun 2008 sebanyak 195.750 batang tanaman. Penanaman ini dilakukan untuk melakukan konservasi terhadap hutan yang ada.

27. URUSAN PARIWISATA

Urusan pariwisata dilaksanakan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata. Meskipun Kabupaten Jombang tidak memiliki obyek wisata yang terkenal namun selama tahun 2008 jumlah kunjungan wisata sebanyak 141.713 wisatawan. Wisatawan yang berkunjung terutama adalah wisatawan lokal dan berkunjung pada obyek – obyek wisata religi berupa makam dan candi.

28. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Urusan yang dilaksanakan di Kabupaten Jombang adalah bidang perikanan diarahkan pada peningkatan produksi perikanan. Perikanan yang dapat dibudidayakan di Kabupaten Jombang adalah budidaya kolam darat. Produksi perikanan selama tahun 2008 sebanyak 9.029,3 ton.

29. URUSAN PERDAGANGAN

Urusan perdagangan dilaksanakan untuk meningkatkan volume perdagangan. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan upaya ini adalah :

- a. Volume perdagangan selama tahun 2008 sebesar Rp. 8.459.197.390,-. Tingginya volume usaha ini sebagai akibat adanya iklim usaha yang semakin kondusif.
- b. Jumlah pedagang yang ada di pasar sebanyak 8.799 orang. Pedagang inilah yang sebagian besarnya menjalankan roda perdagangan di daerah disamping beberapa pedagang besar yang ada .

Dengan tingginya volume perdagangan ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Jombang sedang berjalan ke arah yang lebih baik.

30. URUSAN PERINDUSTRIAN

Urusan industri dilaksanakan melalui upaya untuk meningkatnya produksi sektor industri. Volume usaha IKM selama tahun 2008 sebesar Rp. 271.714.351.000,-. Besarnya volume Produksi ini diharapkan akan mampu menggerakkan sektor tenaga kerja yang ada di daerah. Sedangkan Jumlah produksi yang memiliki ijin sebanyak 210 industri.

31. URUSAN KETRANSMIGRASIAN

Urusan ketransmigrasian dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sebagai kelanjutan program nasional pada masa yang lalu. Namun demikian kesuksesan urusan ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah dalam melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah yang akan menerima. Pada tahun 2008 terdapat 10 KK yang diberangkatkan sebagai transmigran.

2.3. ISU STRATEGIS DAN MASALAH MENDESAK

Tahun 2010 merupakan tahapan kedua dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 – 2013. Isu strategis dan masalah mendesak yang dihadapi tahun 2010 adalah:

1. Masih kurangnya efektivitas pelaksanaan dan koordinasi penanggulangan kemiskinan.
2. Kurangnya akses, kualitas dan pemerataan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas.
3. Sarana dan prasarana kesehatan dasar dan rujukan yang masih belum memadai
4. Terbatasnya daya saing sektor pertanian.
5. Kurangnya dukungan infrastruktur dalam percepatan pembangunan ekonomi.
6. Rendahnya daya tarik investasi, produktivitas dan kompetensi tenaga kerja, serta produktivitas dan akses Usaha Kecil dan Menengah kepada sumber daya produktif dalam rangka mencapai sasaran pemulihan ekonomi.
7. Kinerja birokrasi yang perlu ditingkatkan untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
BESERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1. KONDISI EKONOMI DAERAH TAHUN 2008 DAN TAHUN 2009

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir kondisi perekonomian di wilayah Kabupaten Jombang telah berada pada jalur yang benar sebagaimana yang diharapkan. Ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya nilai tambah barang dan jasa yang diindikasikan dengan pesatnya peningkatan nilai PDRB atas dasar harga berlaku dari Rp. 6,1 trilyun pada tahun 2004 menjadi Rp. 11,1 trilyun (angka sementara) pada tahun 2008. Selain itu struktur perekonomian wilayah Kabupaten Jombang juga semakin kokoh yang diindikasikan dengan semakin naiknya trend PDRB atas dasar harga konstan dari Rp. 4,531 trilyun pada tahun 2004 menjadi Rp. 5,673 trilyun (angka sementara) pada tahun 2008. Selanjutnya PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Jombang tahun 2009 diperkirakan akan mencapai Rp 11,435 trilyun, atau naik sebesar Rp. 256,550 milyar dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini diperoleh dari peningkatan sektor pertanian sebesar Rp. 21,265 milyar, sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp. 13,848 milyar, sektor industri pengolahan sebesar Rp. 81,687 milyar, sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 20,756 milyar, sektor bangunan sebesar Rp. 12,501 milyar, sektor angkutan dan komunikasi sebesar Rp. 218,882 milyar, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar Rp. 7,594 milyar, dan sektor jasa-jasa sebesar Rp.15,267 milyar. Sementara nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Jombang tahun 2009 diperkirakan sebesar Rp. 5,823 trilyun (tahun dasar 2000), atau naik sebesar Rp. 149,594 milyar dari tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jombang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan indikasi yang cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi wilayah dari 4,91 % pada tahun 2003 hingga mencapai 6,07 % pada tahun 2007 sebagaimana nampak pada tabel di bawah ini. Kondisi tersebut cukup baik karena seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Jombang secara sinergis mampu mempertahankan momentum stabilitas perekonomian di Kabupaten Jombang. Dan harapannya adalah dengan iklim perekonomian yang lebih baik lagi baik pada tingkat regional maupun nasional, tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik ini dapat semakin membaik. Sedangkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Jombang secara umum masih didominasi sektor pertanian serta perdagangan, hote' dan restoran. Hal ini berarti bahwa untuk memacu tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Jombang masih bergantung pada sektor pertanian dan perdagangan, hotel dan restoran, baru kemudian disusul dengan sektor-sektor lain seperti industri pengolahan dan jasa-jasa yang secara konsisten menjadi penyumbang pertumbuhan yang cukup besar di wilayah Kabupaten Jombang.

Di sisi yang lain kondisi inflasi yang terjadi di wilayah Kabupaten Jombang juga menunjukkan kecenderungan yang semakin ramah khususnya pada tahun 2007 bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang sempat menyentuh angka 2 digit. Bahkan pada tahun 2007 ini tingkat inflasi di Kabupaten Jombang juga menunjukkan angka di bawah tingkat inflasi Jawa Timur yang berada pada angka 11,39. Kondisi ini tentunya juga merupakan suatu pertanda yang baik bagi dunia usaha untuk mulai menanamkan investasinya di wilayah Kabupaten Jombang.

Kondisi inflasi yang semakin ramah tersebut membawa konsekuensi positif yaitu semakin meningkatnya indeks daya beli masyarakat. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir indeks daya beli masyarakat di wilayah Kabupaten Jombang menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, bahkan hampir selalu berada di atas indeks daya beli masyarakat di wilayah Propinsi Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat konsumsi barang dan jasa masyarakat Kabupaten Jombang relatif baik dan hal ini tentunya juga merupakan peluang yang baik bagi para pengusaha, khususnya di bidang perdagangan retail. Kondisi ini tentunya juga tidak lepas dari terjaganya stabilitas makro ekonomi ataupun stabilitas politik di wilayah Kabupaten Jombang.

Namun demikian pada tahun 2008, berdasarkan angka sementara angka inflasi diperkirakan sedikit mengalami peningkatan yaitu berada pada angka 8,34. Hal ini sebagai imbas dari terjadinya krisis finansial global yang beranjut hingga saat ini. Secara makro, tingkat perekonomian wilayah di Kabupaten Jombang cukup menggembirakan. Hal ini terlihat dengan semakin meningkatnya PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) yang mencapai Rp. 8.292.928,- pada tahun 2007. Sedangkan pada kurun waktu 2003-2007, jelas bahwa tingkat perekonomian wilayah menunjukkan kecenderungan yang sangat positif dan terus meningkat. Hal ini menjadi salah satu indikasi awal bahwa Kabupaten Jombang memiliki kemampuan yang cukup baik di dalam menghasilkan produk domestik barang dan jasa.

Pada tahun 2008 PDRB per kapita ADHB di Kabupaten Jombang diperkirakan mencapai Rp. 9.127.048,-. Dengan kondisi seperti ini diharapkan akan dapat memacu kemampuan daya beli masyarakat sehingga akan berdampak pada meningkatnya aktivitas perekonomian wilayah di Kabupaten Jombang yang pada gilirannya diharapkan dapat mendorong perkembangan ekonomi kreatif di masyarakat. Perkembangan PDRB per kapita ADHB acalah sebagaimana nampak pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Jombang

No	Indikator Makro Ekonomi	Realisasi		Proyeksi	
		2007	2008	2009	2010
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	9.736.387	11.179.402	11.503.160	12.500.512
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan	5.353.301	5.673.428	5.802.057	6.049.683
3	Pertumbuhan Ekonomi	13,67 %	14,82 %	6,07 %	5,98 %
4	Inflasi	7,17 %	8,34 %	7,50 %	7,13 %
5	Indeks Daya Beli	140	148	152	158
6	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	8.292.928	9.127.048	9.320.654	10.026.811

Sumber Data: Bappeda Kabupaten Jombang

Pada sisi kontribusi sektor lapangan usaha, PDRB Kabupaten Jombang pada tahun 2009 diperkirakan masih didominasi oleh sektor-sektor yang secara tradisional menjadi penyangga utama perekonomian di wilayah Kabupaten Jombang seperti sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran tetap menjadi sektor-sektor yang potensial untuk dikembangkan di wilayah Kabupaten Jombang. Selain itu masih ditambah lagi dengan sektor bangunan, angkutan dan komunikasi serta jasa-jasa yang juga sangat potensial untuk dikembangkan, terkait dengan posisi strategis Kabupaten Jombang

sebagai pintu gerbang wilayah Barat Gerbangkertosusila plus. Adapun perkiraan kontribusi yang diberikan oleh 4 sektor lapangan usaha yang dominan di Kabupaten Jombang adalah Sektor pertanian sebesar 9,28%, Sektor Industri Pengolahan sebesar 12,63%, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 34,09%, serta Sektor Jasa-jasa sebesar 9,67%. Secara umum peranan masing-masing sektor lapangan usaha adalah sebagaimana tersebut pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Jombang menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008 dan 2009 (dalam jutaan rupiah)

No	Lapangan Usaha	2007	Prediksi 2008	Perubahan
1	Pertanian	2.988.421	3.400.655	3,84 %
2	Pertambangan & Penggalian	144.143	156.365	2,99 %
3	Industri Pengolahan	1.197.867	1.362.869	4,46 %
4	Listrik, Gas & Air Bersih	111.700	122.015	6,87 %
5	Bangunan	228.526	251.985	2,24 %
6	Perdag., Hotel & Restoran	3.381.593	3.459.401	8,36 %
7	Pengangkutan & Komunikasi	371.768	423.073	8,21 %
8	Keu. Persewaan, & Jasa Perusahaan	361.950	424.137	7,23 %
9	Jasa-Jasa	950.619	1.078.401	6,38 %
JUMLAH		9.736.987	11.179.402	5,98 %

Sumber Data: Bappeda Kabupaten Jombang

Tabel 3.3.

Kontribusi per Sektor PDRB Kabupaten Jombang menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan tahun 2008 – 2009 (dalam %)

No	Lapangan Usaha	2007	Prediksi 2008	Perubahan
1	Pertanian	31,85	30,32	-1,53
2	Pertambangan & Penggalian	1,65	1,72	0,07
3	Industri Pengolahan	11,53	11,85	0,32
4	Listrik, Gas & Air Bersih	1,08	1,13	0,05
5	Bangunan	2,13	1,97	-0,11
6	Perdag., Hotel & Restoran	29,97	31,00	1,13
7	Pengangkutan & Komunikasi	7,03	7,42	0,39
8	Keu. Persewaan, & Jasa Perusahaan	3,96	4,04	0,08
9	Jasa-Jasa	10,82	10,82	0

Sumber Data: Bappeda Kabupaten Jombang

Tabel 3.4.

Laju Pertumbuhan Sektoral Kabupaten Jombang Tahun 2008–2009

No	Lapangan Usaha	2007	Prediksi 2008	Perubahan (%)
1	Pertanian	3,81 %	3,81 %	0,03 %
2	Pertambangan & Penggalian	3,58 %	2,99 %	-0,59 %
3	Industri Pengolahan	4,65 %	4,46 %	-0,19 %
4	Listrik, Gas & Air Bersih	6,87 %	6,87 %	0,00 %
5	Bangunan	2,24 %	2,24 %	0,00 %
6	Perdag., Hotel & Restoran	8,36 %	8,36 %	0,00 %
7	Pengangkutan & Komunikasi	8,21 %	8,21 %	0,00 %
8	Keu. Persewaan, & Jasa Perusahaan	7,23 %	7,23 %	0,00 %
9	Jasa-Jasa	6,38 %	6,38 %	0,00 %

Sumber Data: Bappeda Kabupaten Jombang

Berdasarkan tabel tersebut di atas, struktur perekonomian di wilayah Kabupaten Jombang secara berurutan masih didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, pertanian, industri pengolahan, dan jasa-jasa. Sektor pertanian serta perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor-sektor yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Jombang. Hal ini berarti bahwa untuk memacu tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah, Kabupaten Jombang masih bergantung pada sektor pertanian dan perdagangan, hotel dan restoran, baru kemudian disusul dengan sektor-sektor lain seperti industri pengolahan dan jasa-jasa yang secara konsisten menjadi penyumbang pertumbuhan yang cukup besar di wilayah Kabupaten Jombang.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terlihat bahwa sektor raksasa kita yaitu sektor pertanian berjalan relatif lebih lambat. Apabila kita lihat lebih jauh lagi hal ini disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan sub sektor perkebunan dan kehutanan pada kurun waktu 2003-2007, sedangkan sub sektor tanaman bahan makanan menunjukkan progres yang lebih baik dan tumbuh lebih cepat dari 3,59 % pada tahun 2006 menjadi 3,62 % pada tahun 2007. Di sisi yang lain sektor perdagangan, hotel dan restoran semakin mempercepat langkahnya atau dengan kata lain tumbuh jauh lebih cepat. Hal ini merupakan dampak dari semakin ramahnya laju inflasi serta semakin meningkatnya indeks daya beli masyarakat. Namun demikian tetap harus diingat bahwa dalam konteks perdagangan secara umum, komoditas pertanian juga memainkan peran yang tidak kecil.

Di dalam konstelasi Propinsi Jawa Timur sektor-sektor yang secara tradisional menjadi penyangga utama perekonomian di wilayah Kabupaten Jombang seperti sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran tetap menjadi sektor-sektor yang potensial untuk dikembangkan di wilayah Kabupaten Jombang. Selain itu masih ditambah lagi dengan sektor bangunan, angkutan dan komunikasi serta jasa-jasa yang juga sangat potensial untuk dikembangkan, terkait dengan posisi strategis Kabupaten Jombang sebagai pintu gerbang wilayah Barat Gorbangertosusila plus.

Pada kurun waktu 2003-2007, struktur perekonomian di wilayah Kabupaten Jombang masih didominasi oleh sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran serta jasa-jasa. Namun demikian dalam kurun waktu 2 tahun terakhir peranan keempat sektor tersebut telah mengalami pergeseran. Pada tahun 2007 nampak bahwa sektor perdagangan, hotel dan restoran mulai terlihat seimbang dengan sektor pertanian. Selain itu juga terlihat bahwa sektor industri pengolahan juga terus bergerak naik. Kondisi ini tidak terlepas dari mulai menurunnya dampak intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian serta semakin maraknya konversi lahan pertanian menjadi non pertanian. Tetapi ke depan kita masih menaruh harapan besar pada agribisnis dan agroindustri sebagai pengembangan sektor pertanian. Untuk itu kita berharap agar masyarakat mulai mengembangkan "ekonomi kreatif" yang berbahan baku produk pertanian. Selain itu kami juga berharap agar di Kabupaten Jombang juga dapat dikembangkan pembuatan biofuel dan lain-lain.

3.2. TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH TAHUN 2010 DAN TAHUN 2011

Prospek perekonomian Kabupaten Jombang pada tahun 2010 diperkirakan tetap optimis, walaupun dihadapkan pada tantangan semakin berat. Berdasarkan kondisi tersebut, pertumbuhan ekonomi tahun 2010 ditargetkan di atas 5,0%, dengan nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku sebesar Rp. 12 triliun. Dengan target pertumbuhan sebesar ini diharapkan nilai

PDRB Atas Dasar Harga Konstan mencapai Rp. 6 triliun. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 diproyeksikan berada pada kisaran 7,13 %

Terkendalnya harga barang-barang akibat intervensi kebijakan pemerintah, suksesnya panen raya beberapa komoditi bahan pokok dan lancarnya distribusi diharapkan menjadi pendorong utama turunya laju inflasi yang pada tahun 2010 diproyeksikan sebesar 9,43 %. Dengan laju inflasi yang diproyeksikan tetap 1 digit, diharapkan daya beli masyarakat akan meningkat yang pada akhirnya akan mampu menumbuhkan perekonomian yang lebih baik. Sedangkan pada tahun 2011, dengan semakin membaiknya proses pemulihan dampak dari krisis finansial global, diharapkan kondisi perekonomian pada tahun 2011 juga akan semakin membaik.

Dengan proyeksi kondisi ekonomi makro tersebut diharapkan Pemerintah Kabupaten Jombang bersama dengan seluruh elemen masyarakat dapat terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang telah diproyeksikan dan dapat memanfaatkan secara optimal program-program pemerintah baik yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Jombang Pemerintah Propinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Pusat sebagai sarana pengungkit dalam rangka meningkatkan aktivitas perekonomian wilayah.

3.3. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Terkait dengan proyeksi ekonomi makro di wilayah Kabupaten Jombang sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Jombang diarahkan untuk:

1. Peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perluasan produk agroindustri, penguatan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB, pengembangan ekowisata, agrowisata, wisata budaya, serta peningkatan pengetahuan dan skill peaku ekonom serta penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat.
2. Pada dimensi pembangunan berbasis kewilayahan diarahkan percepatan pembangunan perdesaan dalam rangka meningkatkan keterkaitan ekonomi desa dengan kota melalui implementasi model-model pembangunan perdesaan yang relevan dengan karakteristik wilayah yang ada.
3. Mendorong dan memfasilitasi kemitraan usaha antara pengusaha besar dan menengah dengan pelaku usaha mikro dan kecil.
4. Mendorong terwujudnya iklim investasi yang sehat melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan.
5. Meningkatkan kualitas dan memantapkan kondisi infrastruktur wilayah untuk menunjang aktivitas perekonomian wilayah.
6. Percepatan penyediaan infrastruktur dasar
7. Peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi
8. Pemerataan pembangunan dalam rangka peningkatan daya saing daerah.

Dalam kaitan ini tantangan secara eksternal di tingkat regional maupun nasional adalah tuntutan pengelolaan ekonomi daerah yang tepat dalam kerangka pembangunan nasional dan regional, penataan ekonomi yang berdaya saing dan perbaikan iklim investasi. Sedangkan tantangan secara global terkait dengan standarisasi produk, persaingan produk yang sama dari daerah lain, serta tuntutan konsumen yang semakin berkembang.

3.4. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.4.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah harus diperhatikan upaya untuk peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Pendapatan daerah dalam struktur APBD masih meruokan elemen yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Kebijakan perencanaan pendapatan lebih difokuskan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengalokasikan anggaran pendapatan daerah sesuai dengan potensi riil pendapatan.

Upaya pengelolaan dan peningkatan PAD dilakukan dengan menyusun dan melaksanakan kebijakan yang tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat atau bahkan memberikan rangsangan agar kegiatan ekonomi masyarakat cenderung stabil atau meningkat. Upaya tersebut ditampuh dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.

Tabel 3.5.
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang
Tahun 2007-2010 (dalam Milyar)

No	Jenis	Realisasi		Proyeksi	
		2007	2008	2009	2010
1.1	Pendapatan Asli Daerah	80,44	97,80	79,56	83,55
1.2	Dana Perimbangan	589,73	672,61	706,11	711,11
1.3	Lain lain Pendapatan Yang Sah	31,18	35,16	29,59	34,76

3.4.2. Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan penganggaran sisa lebih perhitungan anggaran diminimalkan dengan pengertian bahwa penggunaan dana harus dimaksimalkan untuk kepentingan pembangunan sehingga tidak ada dana yang tidak dipergunakan (*idle*) serta disesuaikan dengan kapasitas potensi riil untuk menghindari kendala pendanaan.

Tabel 3.6.
Realisasi dan Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Jombang
Tahun 2007-2010 (dalam milyar)

No	Jenis	Realisasi		Proyeksi	
		2007	2008	2009	2010
3.1.1.	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	89,83	59,32	108,04	33,15
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	-	6,00	-	-
3.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,99	0,00	1,15	1,00
3.1.6.	Penerimaan Piutang Daerah	0,99	0,00	1,15	-

3.4.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan kepada belanja yang bersifat wajib dan mengikat yakni belanja tidak langsung, yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan.

Kebijakan belanja daerah meliputi:

1. Dalam merencanakan program dan kegiatan harus disesuaikan dengan RPJMD dan pentahapan pada tahun 2010 dengan tetap melihat capaian pentahapan pada tahun 2009
2. Alokasi belanja setiap kegiatan, harus dilakukan analisis beban kerja dan kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari setiap kegiatan
3. Untuk kegiatan pembangunan fisik, proporsi belanja modal harus lebih besar jika dibandingkan dengan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa
4. Pengalokasian anggaran atas honorarium bagi PNSD supaya dibatasi sesuai dengan tingkat kewajaran dan beban tugas
5. Pengalokasian anggaran atas belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan riil dan wajar
6. Pengalokasian anggaran atas barang inventaris kantor dilakukan secara selektif dengan melakukan evaluasi dan pengkajian atas barang inventaris yang tersedia.
- 7.

Tabel 3.7.

Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2007-2010 (Dalam Milyar)

No	Jenis	Realisasi		Proyeksi	
		2007	2008	2009	2010
BELANJA TIDAK LANGSUNG					
2.1.1	Belanja Pegawai	315,89	438,08	457,07	497,07
2.1.2	Belanja Bunga	0,06	0,08	0,20	0,15
2.1.3	Belanja Hibah	0,86	17,38	10,19	11,00
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	6,14	13,05	31,11	37,28
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan	48,18	57,32	38,38	67,61
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	1,17	0,00	2,00	2,00
BELANJA LANGSUNG					
2.2.1	Belanja Pegawai	26,52	24,68	41,90	9,41
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	137,07	143,55	155,53	84,91
2.2.3	Belanja Modal	98,66	143,22	131,36	162,36

3.4.4. Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan dalam pengeluaran pembiayaan ditekankan pada penyertaan modal pemerintah daerah dengan menginventarisir kebutuhan penyertaan modal terutama pada perusahaan daerah. Setelah diketahui jumlah kebutuhan penyertaan modal pada masing-masing BUMD, maka direncanakan kurun waktu tahun pelaksanaan, sehingga dapat dibuatkan peraturan daerah tentang penyertaan modal.

Tabel 3.8.**Realisasi dan Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2007-2010 (Dalam Milyar)**

No	Jenis	Realisasi		Proyeksi	
		2007	2008	2009	2010
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	4,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4,00	4,00	5,37	2,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,21	5,26	0,30	0,00
3.2.4	pemberian Pinjaman Daerah	0,60	0,75	0,00	0,00

3.4.5. Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah

Berikut ini disajikan rekapitulasi dan proyeksi pendanaan pembangunan daerah, setelah sebelumnya dijelaskan sesuai dengan komponen anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Tabel 3.9.
Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi Kerangka Pendanaan Pembangunan
Daerah Tahun 2007-2010

No	Jenis	Realisasi		Proyeksi	
		2007	2008	2009	2010
1	PENDAPATAN DAERAH				
1.1	Pendapatan Asli Daerah	80,44	97,60	79,56	83,55
1.1.1	Pajak Daerah	14,17	15,34	14,73	15,29
1.1.2	Retribusi Daerah	52,43	67,24	55,98	59,86
1.1.3	Hasil Pengeluaran Kekayaan daerah Yang Dipisahkan	0,27	0,24	0,27	0,27
1.1.4	Lain-lain Pendapatan As. Daerah	13,57	14,48	9,48	8,13
1.2	Dana Perimbangan	596,73	672,61	705,11	711,11
1.2.1	Sagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	49,76	54,82	54,34	54,6
1.2.2	Dana Alokasi Umum	537,05	591,77	601,46	571,31
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	9,89	26,02	49,31	45,2
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	31,18	36,16	29,59	34,76
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dar. Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	31,18	36,85	29,4	34,55
1.3.4	Dana Penyesuaian dan otonomi khusus		1,29	0,19	0,21
1.3.5	Bantuan Keuangan dar. Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		0,02		
A	JUMLAH PENDAPATAN	708,36	808,37	814,26	829,42
2.	BELANJA DAERAH				
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG				
2.1.1	Belanja Pegawai	316,39	436,08	457,07	497,07
2.1.2	Belanja Bunga	0,06	0,08	0,20	0,16
2.1.4	Belanja Hibah	0,56	17,33	10,79	11,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	6,14	13,35	31,11	37,23
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan	46,15	57,32	38,28	57,51
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1,17	0,00	2,00	2,00
B	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	372,17	524,19	538,95	604,99
2.2	BELANJA LANGSUNG				
2.2.1	Belanja Pegawai	26,52	24,88	41,90	9,41
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	137,67	143,55	165,56	64,81
2.2.3	Belanja Modal	98,66	143,22	181,36	162,36
C	JUMLAH BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN KEGIATAN	262,87	311,65	378,82	256,58
D	TOTAL JUMLAH BELANJA	635,04	835,84	917,77	861,57
E	Surplus/(Defisit)	73,31	-27,47	-103,51	-32,15
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	Penerimaan Pembiayaan				
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (S/LPA)	99,83	159,32	108,03	33,15
3.1.2	Pencoran Dana Cadangan		6,00		0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,85		
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,99	0,90	1,15	1,00
F	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	100,82	166,18	109,18	34,15
3.2	Pengeluaran Pembiayaan				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	4,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	4,00	4,00	5,37	2,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	6,21	5,26	0,30	0,00
3.2.4	pemberian Pinjaman Daerah	0,60	0,75	0,00	0,00
G	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	14,81	10,01	5,67	2,00
H	Pembiayaan neto	86,01	156,17	103,51	32,15
I	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	159,32	128,70	0,00	0,00

BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2010

4.1. PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL DAN PROVINSI

4.1.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010

Berdasarkan sasaran yang harus dicapai dalam RPJM II Tahun 2010-2014, kemajuan yang telah dicapai dalam RPJM I Tahun 2005-2009, serta berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus dipecahkan dan dihadapi pada tahun 2010, prioritas pembangunan nasional pada tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat, serta Penataan Kelembagaan dan Pelaksanaan Sistem Perlindungan Sosial
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia
3. Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Hukum, serta Pemantapan Demokrasi dan Keamanan Nasional
4. Pemulihan Ekonomi yang Didukung oleh Pembangunan Pertanian, Infrastruktur, dan Energi
5. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kapasitas Penanganan Perubahan Iklim

Prioritas tersebut dilaksanakan dengan tema pembangunan pada tahun 2010 yaitu "**Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat**".

4.1.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2010

Berdasarkan sasaran yang harus dicapai dalam RPJMD II Tahun 2010-2014, kemajuan yang telah dicapai dalam RPJMD I Sedangkan prioritas RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 adalah :

1. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan.
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan.
3. Perluasan lapangan kerja.
4. Peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan.
5. Peningkatan kesejahteraan sosial.
6. Revitalisasi pertanian dan pengembangan agroindustri.
7. Pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
8. Peningkatan investasi, ekspor non migas dan pariwisata.
9. Peningkatan daya saing industri manufaktur.
10. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.
11. Pemeliharaan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta perbaikan pengelolaan sumberdaya alam dan penataan ruang.
12. Percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.
13. Peningkatan kualitas kesalehan sosial demi terjaganya harmoni sosial.
14. Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua bidang, dan terjaminnya kesetaraan gender.
15. Peningkatan peran pemuda dan pengembangan olahraga.
16. Penghormatan, pengakuan dan penegakan hukum dan hak azasi manusia.
17. Peningkatan kemandirian dan ketertiban dan penanggulangan kriminalitas.
18. Percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial ekonomi dampak Lumpur Sidoarjo.

4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN JOMBANG

4.2.1. RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013

Sejalan dengan hal tersebut, prioritas dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2010, yang merupakan perwujudan periode kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013, dengan visi: **"Terwujudnya Masyarakat Jombang yang sejahtera, agamis dan berdaya saing berbasis agribisnis"**.

Sedangkan Misi Pemerintah Kabupaten Jombang adalah:

1. **Mewujudkan pemerintahan yang baik**, mengandung makna penyempurnaan struktur kelembagaan pemerintah daerah yang dititikberatkan pada proses penataan struktur organisasi agar dapat menjalankan fungsi-fungsi yang diamanatkan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan pemerintah daerah yang profesional, efektif, berkompetensi tinggi serta tanggap terhadap tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan publik.
2. **Meningkatkan kualitas hidup masyarakat**, mengandung arti mengupayakan partisipasi seluruh komponen masyarakat, pemerintah daerah dan swasta agar pembangunan di Kabupaten Jombang mampu menghasilkan sumberdaya manusia yang berkompetensi tinggi dan mempunyai keunggulan kompetitif, mempunyai integritas dan jafidiri masyarakat santri yang dipandu oleh nilai-nilai luhur budaya dan agama.
3. **Membangun struktur perekonomian yang kokoh dengan basis keunggulan kompetitif di bidang agribisnis** mengandung arti mengembangkan daerah dengan memperkuat perekonomian daerah yang berbasis pada kekuatan sektor pertanian dan produk unggulan daerah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan produksi, distribusi, dan pelayanan; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, menumbuhkan keberpihakan pada ekonomi kerakyatan; serta memantapkan program penanggulangan kemiskinan.
4. **Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan**, mengandung arti pembangunan yang dilaksanakan tidak semata untuk mengejar pertumbuhan, namun bagaimana pertumbuhan yang ada sekaligus dapat dirasakan secara merata hasilnya oleh semua lapisan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan faktor alam dan lingkungan sekitarnya (*sustainable development*).

Untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Jombang yang telah dirumuskan, maka tujuan pembangunan Kabupaten Jombang untuk periode 2009-2013 diarahkan pada pencapaian prioritas tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Misi Pertama: Mewujudkan pemerintahan yang baik

Tujuan yang ingin dicapai di dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik adalah:

- a. Mewujudkan pelayanan masyarakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan yang baik, dengan sasaran
 - Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah, dengan indikator:
 - Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat pada setiap tahun

- b. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah, dengan sasaran-sasaran:
- Meningkatnya kemampuan pembiayaan pembangunan, dengan indikator:
 - Jumlah pendapatan asli daerah mencapai 100,4 milyar rupiah pada 2013
 - Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, dengan indikator:
 - Realisasi target capaian kinerja penyelenggaraan pembangunan sebesar 80%
 - Tersusunnya pedoman pengelola keuangan daerah pada tahun 2013
 - Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana pemerintahan daerah, dengan indikator:
 - Tercukupinya 70% kebutuhan sarana dan prasarana pemerintahan daerah yang layak pada 2013
- c. Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional, dengan sasaran:
- meningkatnya kualitas dan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah, dengan indikator:
 - 70 % aparatur memiliki kinerja dengan kriteria baik;
 - Terwujudnya sistem manajemen sumber daya aparatur pemerintah daerah tahun 2013.
- d. Terwujudnya ketatalaksanaan pemerintah yang efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, dengan sasaran-sasaran:
- Terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang efektif dan efisien, dengan indikator:
 - Terwujudnya kelembagaan yang ramping struktur dan kaya fungsi pada 2013;
 - terselesaikannya legislasi kebijakan tepat waktu sesuai kebutuhan pada 2013.
 - Meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam proses pembangunan, dengan indikator:
 - Terwujudnya kemandirian dan kemampuan desa dalam pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat pada tahun 2013.
 - Meningkatkan akses informasi masyarakat terhadap kebijakan dan program-program pembangunan, dengan indikator:
 - Meningkatnya jumlah sarana informasi pembangunan yang berkualitas pada setiap tahun.

Sasaran pada tahun 2010, meliputi :

1. Implementasi dan evaluasi pelaksanaan SPM
2. Penyusunan SPP (Standar Pelayanan Publik) berbasis Citizen Charter semua SKPD (dalam Peraturan Kepala SKPD)
3. Penggalan sumber-sumber PAD
4. Meningkatkan capaian kinerja penyelenggara pembangunan
5. Penetapan dan pelaksanaan Analisa Standar Belanja
6. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang layak
7. Implementasi standar penilaian kinerja
8. penyusunan sistem manajemen sumber daya aparatur pemerintah daerah
9. analisis jabatan, analisis kompetensi jabatan
10. Program legislasi daerah
11. Implementasi dan evaluasi percepatan pembangunan desa
12. Penataan sistem komunikasi informasi

Misi Kedua : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah:

- a. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, dengan sasaran-sasaran :
 - Meningkatkan usia harapan hidup, dengan indikator:
 - Menurunnya kasus gizi buruk hingga dibawah 25 kasus pada 2013;
 - Menurunnya prevalensi penyakit menular 50% untuk masing-masing jenis penyakit menular Tahun 2013;
 - Menurunnya tingkat kematian bayi sebesar 7,88 per 1000 kelahiran hidup dan tingkat kematian Ibu melahirkan 59,51 per 100.000 kelahiran hidup tahun 2013;
 - Jumlah produsen makanan minuman rumah tangga yang mempunyai sertifikat penyuluhan pangan sebanyak 410 pada tahun 2013.
 - Meningkatkan akses pelayanan kesehatan, dengan indikator:
 - Seluruh Puskesmas rawat inap telah memenuhi standar pelayanan (ISO 9000) tahun 2013;
 - Meningkatkan rasio ideal sarana dan prasarana kesehatan dengan jumlah penduduk pada setiap tahun.
 - Meningkatkan cakupan pemeliharaan kesehatan, dengan indikator:
 - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam jaminan pemeliharaan kesehatan sebesar 80% pada tahun 2013.
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, dengan sasaran-sasaran :
 - Meningkatkan sarana prasarana pendidikan, dengan indikator:
 - 90% jumlah sekolah dalam kondisi baik tahun 2013.
 - Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, dengan indikator:
 - Nilai rata-rata nilai UASBN SD/MI sebesar 7,54 pada tahun 2013;
 - Nilai rata-rata nilai UAN SMP/MTs sebesar 7,78 pada tahun 2013;
 - Nilai rata-rata nilai UAN SMU/SMK/MA sebesar 7,75 pada tahun 2013;
 - Formalisasi kurikulum muatan lokal di seluruh tingkatan pendidikan.
 - Meningkatkan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar, dengan indikator:
 - Meningkatkan APM SD/MI sebesar 96,56% pada tahun 2013;
 - Meningkatkan APM SMP/MTs sebesar 95,24% pada tahun 2013;
 - Meningkatkan APM SMA/SMK/MA sebesar 69,12% pada tahun 2013;
 - Meningkatkan APK SD/MI sebesar 107,2% pada 2013;
 - Meningkatkan APK SMP/MTs sebesar 104,5% pada 2013.
 - Meningkatkan APK SMA/SMK/MA sebesar 92,5% pada 2013.
- c. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar masyarakat dengan sasaran:
 - Terwujudnya sarana dan prasarana dasar yang memadai bagi masyarakat, dengan indikator

- Terwujudnya perumahan yang layak huni bagi masyarakat kurang mampu sejumlah 2.500 unit pada 2013;
 - Terwujudnya sanitasi lingkungan di permukiman yang padat huni di wilayah perkotaan pada tahun 2013;
 - Terpenuhinya kebutuhan air bersih di daerah rawan air bersih pada tahun 2013
- d. Meningkatkan daya beli masyarakat dengan sasaran:
- Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidup layak (KHL), dengan indikator:
 - Terwujudnya pendapatan per kapita sebesar Rp. 12 juta pada tahun 2013;
 - Tingkat pengangguran terbuka mencapai 3,4% pada 2013.
- e. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, dengan sasaran:
- Terwujudnya fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika di dalam pembangunan, dengan indikator:
 - Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang menegakkan norma-norma sosial, kesopanan, kesusilaan dan norma-norma agama.

Sasaran pada tahun 2010, meliputi :

1. Menurunkan kasus gizi buruk hingga dibawah 150 kasus
2. Menurunkan prevalensi penyakit menular sebesar 10 % untuk masing-masing jenis penyakit menular
3. Menurunnya tingkat kematian bayi sebesar 9,12 per 1000 kelahiran hidup dan tingkat kematian ibu melahirkan 75,98 per 100.000 kelahiran hidup tahun 2013
4. Meningkatkan jumlah produsen makanan minuman rumah tangga yang mempunyai sertifikat penyuluhan pangan sebanyak 10 produsen
5. Peningkatan standar pelayanan sesuai ISO 9000 (2 puskesmas rawat inap)
6. Meningkatkan status puskesmas menjadi puskesmas rawat inap (1 puskesmas)
7. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam jaminan pemeliharaan kesehatan sebesar 15%
8. 45% sekolah dalam kondisi baik
9. Nilai rata-rata nilai UASBN SD/MI sebesar 7,36
10. Nilai rata-rata nilai UAN SMP/MTs sebesar 7,63
11. Nilai rata-rata nilai UAN SMU/SMK/MA sebesar 7,6
12. Formalisasi kurikulum muatan lokal (agama, pengenalan wilayah, dan cinta lingkungan) di tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMU/SMK/MA.
13. Meningkatkan APM SD/MI sebesar 93,64%
14. Meningkatkan APM SMP/MTs sebesar 88,32%
15. Meningkatkan APM SMA/SMK/MA sebesar 65,6%
16. Meningkatkan APK SD/MI sebesar 104,75%
17. Meningkatkan APK SMP/MTs sebesar 102,75%
18. Meningkatkan APK SMA/SMK/MA sebesar 88,25%
19. Peningkatan perumahan tidak layak huni menjadi layak huni bagi masyarakat kurang mampu sejumlah 500 unit
20. Peningkatan infrastruktur terpadu di permukiman yang padat huni
21. Eksplorasi dan eksploitasi air bersih di daerah Ngusikan, Plandaan, Kabuh, Kudu
22. Peningkatan pendapatan per kapita

- 23. Menurunkan tingkat pengangguran sebesar 4,92%
- 24. Pemberdayaan organisasi sosial kemasyarakatan

Misi Ketiga: Membangun struktur perekonomian yang kokoh dengan basis keunggulan kompetitif di bidang agribisnis

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam membangun struktur perekonomian yang kokoh dengan basis keunggulan kompetitif di bidang agr bisnis adalah:

- a. Meningkatkan perekonomian yang berbasis agribisnis, dengan sasaran-sasaran:
 - Mantapnya ketahanan pangan, dengan indikator:
 - Terwujudnya stok pangan pada 500 poktan pada 2013;
 - Pemenuhan kecukupan protein hewani sebesar 45.73 m/hari/orang;
 - Tercapainya nilai NTP sebesar 111 pada tahun 2013 (dengan tahun 2007 sebagai tahun dasar).
 - Terwujudnya jejaring agribisnis yang kuat dan kokoh, dengan indikator:
 - Tumbuh kembangnya industri olahan di sentra-sentra produksi pertanian.
 - Meningkatnya ekspansi pasar produk pertanian tahun 2013;
 - Terlembaganya sistem kemitraan agribisnis tahun 2013
 - Meningkatkan sistem infrastruktur penunjang agribisnis, dengan indikator:
 - Meningkatkan aksesibilitas dan distribusi pada sentra-sentra produksi;
 - Meningkatnya layanan jaringan irigasi teknis.
- b. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan investasi di bidang agribisnis, dengan sasaran-sasaran :
 - Meningkatnya investasi usaha mikro, kecil, dan menengah, dengan indikator:
 - Meningkatnya jumlah unit usaha sebesar 3.140 dan nilai investasi sebesar Rp. 5.391.125.485 pada 2013.
 - Terwujudnya sistem investasi daerah yang efektif dan efisien, dengan indikator:
 - Meningkatnya jumlah PMA dan PMDN sebesar 30% pada 2013.
- c. Mewujudkan kawasan strategis cepat tumbuh berbasis agribisnis, dengan sasaran:
 - terwujudnya klaster-klaster agribisnis di Kabupaten Jombang, dengan indikator:
 - Terwujudnya kawasan strategis dan cepat tumbuh pada seliap SSWP pada 2013;
 - Terwujudnya keterkaitan bisnis yang saling menguntungkan antar pelaku usaha di bidang agribisnis dalam satu kawasan pada tahun 2013.

Sasaran pada tahun 2010, meliputi:

1. Mewujudkan lumbung pangan pada 100 poktan
2. Pemenuhan kecukupan protein hewani sebesar 45.30 gram/hari/orang
3. Meningkatkan nilai NTP
4. Pengembangan unit usaha produk olahan
5. Memperluas pasar regional
6. Fasilitasi kemitraan petani dengan industri

7. Penguatan kelembagaan kelompok tani
8. Penyediaan infrastruktur jalan menuju sentra-sentra produksi
9. Perluasan dan peningkatan jaringan irigasi teknis
10. Penyediaan lahan pertanian abadi seluas 27.125 Ha
11. Pengembangan unit usaha mikro, kecil, dan menengah
12. Penyederhanaan sistem investasi PMA dan PMDN
13. Perencanaan dan penetapan kawasan strategis dan cepat tumbuh
14. Perencanaan penyediaan layanan penunjang bagi kawasan strategis dan cepat tumbuh

Misi Keempat : Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan

Tujuan yang ingin dicapai dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan adalah:

- a. Menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup dengan sasaran:
 - Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan indikator:
 - Terpenuhi baku mutu kualitas lingkungan pada 2013;
 - Terkendalinya pemanfaatan sumberdaya alam;
 - Terkonservasinya sumber daya alam di wilayah rawan bencana alam;
 - Tersedianya ruang terbuka hijau sebesar 30% di perkotaan pada 2013;
 - Terwujudnya lingkungan sehat di setiap kawasan permukiman pada 2013.
- b. Menjamin terpeliharanya nilai-nilai budaya lokal, dengan sasaran:
 - terwujudnya kelestarian nilai-nilai kearifan lokal yang berpihak pada kelestarian lingkungan hidup, dengan indikator:
 - Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

Sasaran pada tahun 2010, meliputi :

1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup di wilayah kabupaten
2. Pengendalian pemanfaatan sumber daya alam
3. Konservasi hutan lindung dan lahan kritis
4. Penetapan dan penyediaan lahan bagi ruang terbuka hijau
5. Penyehatan lingkungan permukiman
6. Pelibatan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan lingkungan wilayah

Berkaitan dengan RKP Nasional RKPD Provinsi Jawa Timur dan pentahapan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013, maka prioritas pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2010 adalah:

1. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, dengan sasaran:
 - Meningkatnya usia harapan hidup
 - Meningkatnya akses pelayanan kesehatan
 - Meningkatnya cakupan pemeliharaan kesehatan
 - Meningkatnya sarana prasarana pendidikan
 - Meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan
 - Meningkatnya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar
2. Peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan, dengan sasaran:
 - Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidup layak
 - Meningkatnya akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat.

3. Revitalisasi pertanian dan pengembangan agribisnis, dengan sasaran:
 - Meningkatnya Nilai Tukar Petani
 - Mantapnya ketahanan pangan
 - Meningkatnya pendapatan petani
 - Terwujudnya jejaring agribisnis yang kuat dan kokoh
4. Peningkatan kesempatan kerja dan kewirausahaan, dengan sasaran:
 - Mendorong percepatan kesempatan kerja dan berusaha
 - Meningkatnya investasi usaha mikro, kecil dan menengah
 - Terwujudnya klaster-klaster agribisnis
5. Pemanjapan penyelenggaraan pemerintahan, dengan sasaran:
 - Terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang efektif dan efisien
 - Meningkatnya peran serta aktif masyarakat dalam proses pembangunan
 - Meningkatnya akses informasi masyarakat terhadap kebijakan dan program pembangunan
 - Meningkatkan kompetensi aparatur
 - Meningkatkan kapasitas aparatur
 - Meningkatkan etos kerja aparatur pemerintah daerah
6. Pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur, dengan sasaran:
 - Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan sarana dan prasarana dasar
7. Peningkatan Kualitas Sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan sasaran:
 - Terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam dan terwujudnya kelestarian lingkungan hidup.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Perencanaan program dan kegiatan, indikator kinerja (capaian program, keluaran dan hasil kegiatan), pagu indikatif, lokasi, SKPD penanggung jawab, serta keterkaiannya dengan prioritas dan sasaran pembangunan yang ditetapkan, dapat dilihat pada matriks berikut ini:

Tabel 5.1.

Prioritas, Sasaran, dan Program Pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2010

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program	Pagu Indikatif (Rp.)	SKPD Penanggung Jawab
1.	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan usia harapan hidup ▪ Meningkatkan akses pelayanan kesehatan ▪ Meningkatkan cakupan pemeliharaan kesehatan ▪ Meningkatkan sarana prasarana pendidikan ▪ Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan ▪ Meningkatkan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar 	1.01.15. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	6.726.000.000	▪ Dinas Pendidikan
			1.01.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (SDI/SW/MTs);	82.682.359.000	▪ Dinas Pendidikan
			1.01.17. Program Pendidikan Menengah (SMA/SMK/MA)	21.937.052.000	▪ Kesehatan
			1.01.18. Program Pendidikan Non Forme	2.255.000.000	▪ RS/JD
			1.01.19. Program Pendidikan Luar Biasa	117.803.500	▪ DPPKG
			1.01.20. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	3.158.393.600	▪ Kantor Asisip FDE
			1.01.22. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1.929.250.000	Perpustakaan
			1.02.15. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	2.894.371.000	
			1.02.16. Program Ujaya Kesehatan Masyarakat	21.943.344.700	
			1.02.17. Program Pengawasan Obat dan Makanan	27.520.760	
			1.02.19. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	571.523.700	
			1.02.20. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	940.600.000	
			1.02.21. Program Pengembangan Lingkungan Sehat	651.554.000	
			1.02.22. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	5.214.068.500	
			1.02.23. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1.039.136.000	
			1.02.24. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	399.050.000	
			1.02.26. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas pembantu dan puskesmas perantara, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit jiwa, rumah sakit jiwa dan prasarana rumah sakit jiwa	7.528.000.000	
			1.02.26. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit jiwa	30.589.640.000	
			1.02.27. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit jiwa	1.145.000.000	
			1.02.28. Program pembinaan peningkatan pelayanan kesehatan	529.770.000	
			1.02.29. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balia	354.936.500	
			1.02.30. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	93.600.000	
			1.02.31. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	231.948.000	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program	Pagu Indikatif (Rp.)	SKPD Penanggung Jawab
1.02.22.			Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	414.634.500	
1.1.15.			Program Keserasian Kebijakan: Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	100.000.000	
1.1.16.			Program Penguatan Kelengkapan Pengasuhan: Lanihan Gender dan Anak	633.675.000	
1.1.17.			Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	262.525.000	
1.11.18.			Program peningkatan peran serta dan kesadaran jender dalam pembangunan	451.130.000	
1.11.19.			Program penguatan kelembagaan pengurusan jender dan anak	560.000.000	
1.12.15.			Program Keluarga Berencana	1.473.364.000	
1.12.16.			Program Kesehatan Reproduksi Remaja	174.618.000	
1.12.17.			Program pelayanan kontrasepsi	56.365.000	
1.12.18.			Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/R yang mandiri	724.525.000	
1.12.19.			Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	63.000.000	
1.12.20.			Program penggambaran pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	20.400.000	
1.12.21.			Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS dan masuk HIV/AIDS	35.280.000	
1.12.22.			Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	241.300.000	
1.12.24.			Program pengembangan model operasional SKB-Posyandu-PADU	81.425.000	
1.25.15.			Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	908.001.400	
2.	Peningkatan efektivitas peranguangan kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mencakup kebutuhan hidup layak Meningkatnya akses dan mutu 	<ul style="list-style-type: none"> Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adak Terpapar (KAT) dan Penyandang Masalah Kesehatan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 	<ul style="list-style-type: none"> 495.200.000 1.208.450.000 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Sosial Nakotrans Bappeda Bejemas

Ko	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program	Pagu Indikatif (Rp.)	SKPD Penanggung Jawab		
3.	Revitalisasi pertanian dan pengembangan agribisnis	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Nilai Tukar Pelari Maintapnya ketahanan pangan Meningkatnya pendapatan petani Terwujudnya jejaring agribisnis yang kuat dan kokoh 	1.13.17.	Program pembinaan anak terlantar	44.594.000	Pendes	
			1.13.19.	Program pembinaan panti asuhan /anti jompo	1.663.400.000		
			1.13.21.	Program Pembudayaan Kerja/bhagaan Keseliteraan Sosial	270.000.000		
			1.13.22.	Program Partisipasi Sosial Masyarakat	276.000.000	Pendes	
			1.22.15.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat: Perdesaan	19.785.325.300		
			1.22.16.	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	1.950.000.000	Pendes	
			1.22.17.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	45.928.470.000		
			1.21.15.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	3.717.500.000		<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pertanian Kemendagri Ketahanan Pangan Dinas Hubdan
			2.01.15.	Program Peningkatan Keseljahteraan Petani	600.000.000		
			2.01.17.	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	36.000.000		
			2.01.18.	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	2.115.000.000		
			2.01.19.	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	5.270.000.000		
			2.01.20.	Program peningkatan penyuluhan pertanian/perkebunan lapangan	817.500.000		
			2.01.21.	Program pencegahan dan penanganan penyakit ternak	335.000.000		
			2.01.22.	Program peningkatan produksi hasil peternakan	1.710.800.000		
2.01.23.	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	374.899.400					
2.01.24.	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	435.530.000					
2.01.25.	Program Pembudayaan Penyuluh Peternakan Terkemuka	180.600.000					
2.05.20.	Program pengembangan budidaya perikanan	362.023.000					
2.05.21.	Program pemberdayaan peternak/lembaga perikanan	42.500.000					
4.	Peningkatan kesempatan	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong perolehan 	1.14.15.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	877.768.000	Dinas	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program	Pagu Indikatif (Rp.)	SKPD Penanggung Jawab
	kerja dan kewirausahaan	<ul style="list-style-type: none"> kesempatan kerja dan benih usaha Meningkatnya investasi usaha mikro, kecil dan menengah Terwujudnya klaster-klaster agribisnis 	<p>Kerja</p> <p>1.14.16. Program Peningkatan Kesempatan Kerja</p> <p>1.14.17. Program Peningkatan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</p> <p>1.15.15. Program Pengembangan Kowirasahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</p> <p>1.15.17. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</p> <p>1.16.18. Program Peningkatan Kualitas Kemitraan Koperasi</p> <p>1.16.15. Program Peningkatan Promosi dan Kemitraan Investasi</p> <p>1.16.16. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</p> <p>1.16.17. Program penyediaan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah</p> <p>1.17.15. Program Pengembangan Nilai Budaya</p> <p>1.17.16. Program Pengelolaan Keayaan Budaya</p> <p>1.17.17. Program Pengelolaan Keragaman Budaya</p> <p>1.17.16. Program pengembangan kemitraan pembelajaran kekeayaan budaya</p> <p>1.16.15. Program Pengembangan dan Kemitraan Kegiatan Perisda</p> <p>1.18.16. Program peningkatan peran serta kepemudaan</p> <p>1.18.17. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda</p> <p>1.18.18. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba</p> <p>1.18.19. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga</p> <p>1.18.20. Program Peminaan dan Penayarakatan Olah Raga</p> <p>1.18.21. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga</p> <p>2.04.15. Program pengembangan pariwisata</p> <p>2.04.16. Program pengembangan destinasi pariwisata</p> <p>2.04.17. Program pengembangan Kemitraan</p> <p>2.06.15. Program peningkatan konsultan dan penjaminan</p>	<p>815.971.000</p> <p>1.025.000.000</p> <p>462.180.250</p> <p>32.450.000</p> <p>502.200.000</p> <p>1.092.550.000</p> <p>30.000.000</p> <p>115.000.000</p> <p>300.000.000</p> <p>900.000.000</p> <p>800.000.000</p> <p>250.000.000</p> <p>125.000.000</p> <p>100.000.000</p> <p>450.000.000</p> <p>75.000.000</p> <p>75.000.000</p> <p>3.475.000.000</p> <p>3.150.000.000</p> <p>1.515.000.000</p> <p>60.000.000</p> <p>430.000.000</p> <p>64.659.260</p>	<p>Scsakertrans</p> <p>Diras</p> <p>Koperasi</p> <p>UMKM</p> <p>Kanis</p> <p>Penanaman Modal PPD</p> <p>Disporabudpar</p> <p>Disperindag</p> <p>Pasar</p>

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program	Pagu Indikatif (Rp.)	SKPD Penanggung Jawab
			perdagangan		
			Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional	30.570.000	
			Program peningkatan dan pengurangan ekspor	25.794.680	
			Program peningkatan efisiensi peredaran dalam negeri	82.476.000	
			Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	14.546.880	
			Program Penguatan Pasar Daerah	211.890.000	
			Program Penguatan Pasar Daerah	65.151.120	
			Program peningkatan kapasitas blok sistem produksi	445.200.000	
			Program peningkatan industri kecil dan menengah	650.000.000	
			Program peningkatan kemampuan teknologi industri	170.000.000	
			Program penataan struktur industri	250.000.000	
			Program pengembangan mitra-sentra industri potensial	200.000.000	
			Program pengembangan wilayah transmigrasi	52.475.000	
5	Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang efektif dan efisien Meningkatnya peran serta aktif masyarakat dalam proses pembangunan Meningkatnya akses informasi masyarakat terhadap kebijakan dan program pembangunan Meningkatkan kompetensi aparatur Meningkatkan kapasitas aparat Meningkatkan etos kerja aparat pemerintah daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Program Kerjasama Pembangunan: Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan pembangunan ekonomi Program pelayanan sosial dan budaya Program peningkatan prasarana wilayah dan sumber daya alam Program Penataan Administrasi Kependudukan Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program pemerintahan dan pelayanan publik Program pengembangan wawasan kebangsaan Program peningkatan wawasan kebangsaan Program pembinaan masyarakat untuk menjaga ketertahan dan keamanan Program peningkatan pemberantasan penyakit 	<ul style="list-style-type: none"> 125.000.000 92.000.050 559.167.500 300.000.000 240.670.000 75.000.000 3.375.000.000 162.012.000 993.052.000 202.000.000 70.000.000 14.700.000 89.132.000 	<ul style="list-style-type: none"> Bappeda Dinas Perhubungan & Komunikasi & Sekoterial Daerah Inspektorat BKID Badan Pelayanan Peninaran DPPKAD Bapamas Pendes Kantor Atsip PDE & Perpustakaan Kecamatan Kelurahan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program	Page Indikatif (Rp.)	SKPD Penanggung Jawab
1.19.21.			masyarakat (paket)	413.600.000	
1.19.22.			Program pendidikan politik masyarakat		
1.19.23.			Program pencegahan dini dan penanganan korban bencana alam	570.000.000	
1.20.15.			Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	301.500.000	
1.20.16.			Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	9.548.331.000	
1.20.17.			Program peningkatan pelayanan keahliwan kepala daerah	1.573.380.000	
1.20.19.			Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	4.609.021.200	
1.20.20.			Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	246.103.500	
1.20.21.			Program peningkatan sistem pengawasan internet dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	623.400.000	
1.20.22.			Program peningkatan profesionalisme tenaga pemerintah dan aparaturnya	209.502.000	
1.20.23.			Program perataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	11.300.000	
1.20.24.			Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	223.530.000	
1.20.25.			Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	313.270.500	
1.20.26.			Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	203.664.500	
1.20.27.			Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1.215.831.000	
1.20.34.			Program Penataan Daerah Otonomi Baru	122.772.800	
1.20.35.			Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	4.225.457.000	
1.20.36.			Program pembinaan dan pengembangan aparatur	3.190.540.000	
1.20.37.			Program Peningkatan Pelayanan	430.750.000	
1.20.52.			Program fasilitasi administrasi keajaib lahan rakyat	500.000.000	
1.20.91.			Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan SUMD	95.000.000	
1.20.92.			Program Peningkatan Kapasitas Daerah	12.705.000.000	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program	Pagu Indikatif (Rp.)	SKPD Penanggung Jawab
			1.20.02. Program Peningkatan Pelayanan Perijinan	870.560.000	
			1.22.19. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	17.254.216.000	
			1.23.15. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	344.965.000	
			1.24.16. Program penyelamatan dan pelestarian dokumentasi/arsip daerah	196.266.900	
			1.24.18. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	55.906.500	
			1.25.15. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1.239.706.000	
			1.25.16. Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	250.450.000	
			1.25.17. Program Fasilitas Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	137.723.000	
			1.25.18. Program kerjasama informasi dengan mas media	1.348.597.500	
6.	Pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan sarana dan prasarana dasar 	1.03.15. Program pembangunan jalan dan jembatan 1.03.16. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1.03.17. Program pembangunan turap/talud/borjone 1.03.18. Program rehablilasi pemeliharaan jalan dan jembatan 1.03.19. Program rehablilasi pemeliharaan talud/borjone 1.03.21. Program tanggap darurat jalan dan jembatan 1.03.23. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 1.03.24. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 1.03.25. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 1.03.26. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 1.03.27. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 1.03.28. Program Pengendalian Banjir 1.03.30. Program pembangunan infrastruktur perdesaan 1.03.34. Program Peningkatan Jalan Umum 1.04.16. Program Pengembangan Perumahan	213.594.303.045 55.872.930.000 44.246.374.500 20.787.050.000 9.670.000.000 900.000.000 300.000.000 57.363.269.200 600.000.000 1.250.000.000 11.136.000.000 12.610.806.000 845.020.000 595.000.000 3.220.000.000	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PU Bina Marga & Perairan • Dinas PU Cipta Karya • Tale Rerang KP • Bappeda • Dines • Perhubungan & Komunikasi

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program	Pagu Indikatif (Rp.)	SKPD Penanggung Jawab
			1.04.16. Program Lingkungan Sehat Pemukiman	2.472.000.000	
			1.04.20. Program pengelolaan area pemukiman	750.000.000	
			1.06.16. Program Pemertanaran Lata Ruang	915.000.000	
			1.05.16. Program Pemanfaatan Ruang	25.000.000	
			1.06.17. Program Pengoptimalan Pemanfaatan Ruang	60.000.000	
			1.07.16. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	950.000.000	
			1.07.16. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	359.250.000	
			1.07.17. Program peningkatan pelayanan angkutan	45.000.000	
			1.07.18. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	240.000.000	
			1.07.19. Program bongkar dalam dan penanganan lalu lintas	763.500.000	
			1.07.20. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	35.000.000	
7.	Peningkatan Kualitas Sumber daya alam dan lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam dan kejajidnya kelestarian lingkungan hidup 	1.08.15. Program Pengembangan Kinerja Penguasaan Persampahan 1.08.16. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakar Lingkungan Hidup 1.08.17. Program Perindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1.08.19. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 1.08.20. Program peningkatan pengendalian polusi 1.08.21. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	5.858.750.000 992.000.000 127.000.000 310.000.000 155.000.000 2.878.000.000	Badan Lingkungan Hidup, Dinas PU Cipta Karya

BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang Tahun 2010 merupakan dokumen induk untuk perencanaan pembangunan tahunan yang di dalamnya memuat kebijakan pembangunan, baik yang terkait pembiayaannya dengan sumber pendanaan dari APBD Kabupaten Jombang yang disinkronkan dengan APBD Provinsi Jawa Timur dan APBN serta kemungkinan investasi dan peluang partisipasi masyarakat.


Di samping itu RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2010 menjadi acuan dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Jombang Tahun 2010 serta pedoman bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam menyusun langkah-langkah dan prioritas untuk pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Keberhasilan pembangunan Daerah sangat tergantung pada sikap mental dan tekad serta semangat dan disiplin semua pihak dan para pelaku pembangunan untuk mampu menjawab peluang dan kesempatan yang ada, agar dapat meminimalisir permasalahan yang muncul sebagai tantangan dan hambatan di masa mendatang.

Dalam menyongsong tahun 2010 dengan nuansa dan harapan baru, maka upaya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi yang lebih berkualitas serta mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu diharapkan partisipasi dan disiplin yang tinggi serta profesionalisme dari aparatur, sehingga tujuan itu dapat tercapai dan dapat secara berangsur-angsur mewujudkan visi dan misi Kabupaten Jombang.

Sangat disadari bahwa RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2010 bukanlah suatu dokumen yang sangat sempurna namun dengan acuan dan panduan ini diharapkan dapat mampu mengimplementasikan aspirasi masyarakat, baik yang diperoleh lewat penaringan aspirasi oleh aparat legislatif maupun melalui sistem kompilasi dari hasil perencanaan yang ada. Semoga RKPD ini dapat memberikan landasan berpijak dalam menyusun anggaran dan melaksanakan program pembangunan di Kabupaten Jombang.

No.	Tgl. Ditetapkan	Tempat	Tanggal
1.			
2.			
3.			
4.			



BUPATI JOMBANG



SUYANTO